



LAPORAN TAHUNAN

PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018



**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018**

LAPORAN TAHUNAN
PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan HidayahNya, telah dapat disusun laporan tahunan, laporan penilaian hasil pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program Kependudukan ,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), serta Parameter Kependudukan Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

Buku ini membahas hasil pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan, Analisa dan evaluasi Standart Minimal (SPM) Program KKBPK tahun 2018. Juga sebagai langkah lanjutan untuk memonitor parameter kependudukan Program KKBPK dalam era Desentralisasi. Sehingga akan dapat mengurangi adanya kesenjangan dan lebih jauh lagi dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Nasional.

Hasil Analisa dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program KKBPK tahun 2018 ini dimaksudkan memberikan acuan dan bekal pengetahuan serta mempermudah bagi petugas pengelola Program KKBPK di lini lapangan dalam melakukan langkah-langkah pengelolaan analisa data dari indikator kinerja SPM Program KKBPK. Selain itu diharapkan dapat memperoleh gambaran informasi tentang kelangsungan pengelolaan Program KKBPK secara cepat dan akurat dan dapat segera memecahkan permasalahan yang ada.

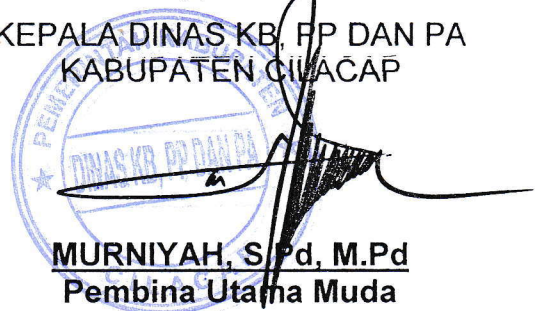
Selain itu buku ini juga berisikan laporan tentang perkembangan Kampung KB di kabupaten Cilacap dan dapat dilihat hasil intervensi kegiatannya di website <http://www.kampungkb.bkkbn.goid>.

. Kami menyampaikan terima kasih kepada para pengelola data program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan yang telah menyampaikan laporannya tepat waktu dan menggunakan aplikasi statistik rutin ke alamat <http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr>.

Semoga Buku laporan tahunan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Cilacap, 11 Pebruari 2019

KEPALA DINAS KB, FP DAN PA
KABUPATEN CILACAP



MURNIAH, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621020 198508 2 001

DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI DAN PENGENDALIAN LAPANGAN PROGRAM KKBPK.....	7
A. Pelayanan Kontrasepsi	7
B. Pengendalian Lapangan	10
BAB III KAMPUNG KB.....	29
A. Latar Belakang	29
B. Manfaat	32
C. Tujuan Dibentuknya Kampung KB	33
D. Syarat-syarat Pembentukan Kampung KB.....	33
E. Kriteria Wilayah Kampung KB	33
F. Sasaran Kegiatan Kampung KB.....	35
G. Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat.....	36
H. Sosialisasi dan Advokasi Kampung KB.....	37
I. Penunjukan Lokasi Kampung KB	38
J. Proses Pembentukan Kampung KB.....	39
K. Koordinasi dan Advokasi kepada Stakeholder	43
L. Pencanaan Kampung KB	43
M. intervensi Kegiatan	44
N. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi.....	45
O. Regulasi Bupati.....	45
P. Pengembangan Kampung KB.....	45
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Permasalahan kependudukan di tingkat nasional saat ini sangat kompleks, baik dari sisi jumlah, laju pertumbuhan, persebaran, dan mutu penduduk. Terkait tentang jumlah penduduk Indonesia, ternyata hasil Sensus Penduduk 2010 yang lalu melebihi dari jumlah proyeksi sebelumnya. Semula hanya diperkirakan berjumlah 234 juta, ternyata faktanya 237,6 juta. Pertumbuhan penduduk Indonesia sejak tahun 1961-2000 memang menurun, namun pada periode 2000-2010 meningkat menjadi 1,49% dari periode sebelumnya yang hanya 1,45%. Jika laju pertumbuhan tidak ditekan maka jumlah penduduk di Indonesia pada 2045 menjadi sekitar 450 juta jiwa. Ini berarti satu dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini pemerintah dalam mengatasi permasalahan kependudukan belum tuntas. Berbagai tindakan maupun upaya yang dilakukan hanya bersifat reaktif terhadap dampak pembangunan yang terjadi di suatu wilayah, serta perlakuannya cenderung normatif. Pola penanganan (intervensi program) dengan cara memobilisasi semacam ini tidak dapat diteruskan. Sejalan dengan otonomi daerah, maka upaya pengembangan **pembangunan berwawasan kependudukan secara konsiten dan berkelanjutan** merupakan pilihan yang paling tepat ditengah dinamika penduduk yang kompleks.

Pada tingkat Kabupaten Cilacap, dari data dasar Kabupaten Cilacap tahun 2018 menunjukkan bahwa kabupaten ini selama 1 tahun terakhir mengalami laju pertumbuhan 0,34 % . Mengingat jumlah penduduk mencapai 1.842.913 jiwa, angka *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Cilacap menurut Susenas 2015 2,56, sementara menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap tahun 2018 ada 28.621 kelahiran, maka banyak hal yang harus diperhatikan.

Dari permasalahan tersebut Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi tumpuan harapan, karena dengan program ini tidak saja bertujuan untuk mengendalikan jumlah kelahiran namun juga bertujuan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Permasalahannya, sejak otonomi daerah diberlakukan banyak pemerintah kabupaten atau kota yang kurang memperhatikan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ini.

Program pembangunan fisik dan ekonomi masih diutamakan, padahal sehebat apapun pembangunan ekonomi, namun jika jumlah penduduk tidak terkendali, maka sia-sialah pembangunan tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa diarahkan untuk menguatkan desa dan masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Pembangunan desa dari potensi-potensi yang ada perlu didukung dengan rencana kerja yang tepat dan didukung dengan penganggaran untuk digunakan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) salah satunya agendanya adalah meningkatnya Sumber Daya Manusia yang salah satunya ditempuh melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa peran Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga diarahkan untuk mengendalikan kelahiran, menurunkan angka kematian dan mengarahkan mobilitas penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang sehingga tercapainya Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Hal ini selaras dengan rencana pembangunan desa khususnya dalam peningkatan kualitas masyarakat.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mempertegas bahwa program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga menjadi hal wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti disebutkan dalam pasal 12 ayat (2).

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mestinya juga memperhatikan prinsip melayani klien (peserta KB) dengan “quality of care” dan bukan hanya “quality of service”. Yang disebut pertama adalah prinsip memperhatikan klien tidak hanya secara teknis, namun juga hubungan antar pribadi yang intens yang hasil akhirnya ada peningkatan pengetahuan klien terhadap perilaku reproduksi yang sehat. Jika program kependudukan dapat diatasi, maka Millenium Development Goals (MDGs) di Kabupaten Cilacap akan makin sukses, tidak saja dari masalah angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, namun juga untuk masalah kemiskinan, pendidikan, lingkungan dan sebagainya.

Seiring dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga menjadikan komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK) sebagai pelayanan dasar dalam pembangunan Desa.

Upaya meningkatkan pengelolaan program KKBPK di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan kapasitas Kepala Desa beserta unsur lain yang terkait seperti : Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Dengan pengetahuan dan sikap para tim operasional Keluarga Berencana tingkat desa diharapkan Program KKBPK dapat menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa melalui forum-forum strategis di tingkat Desa. Mulai dari Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta pengendalian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga .

Di Kabupaten Cilacap, telah dilakukan upaya sosialisasi Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada pemerintahan desa untuk memberikan gambaran yang jelas bahwa Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan sumber daya manusia di desa melalui upaya pengelolaan program KKBPK sebagai salah satu prioritas utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia di desa.

Selanjutnya berbagai upaya advokasi dan asistensi telah dilakukan oleh para Penyuluh Keluarga Berencana di lini lapangan kepada stakeholder desa dan mengawal rancangan kegiatan Pengelolaan program KKBPK dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) agar tersepakati dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dan teranggarkan dalam Anggaran pendapatan belanja Desa

(APBDesa). Dari 269 Desa di 21 Kecamatan yang melaksanakan Musrenbangdes diperoleh anggaran pengelolaan program KKBPk di Desa pada tahun 2018 sejumlah Rp. 2.434.077.737,- (rincian per Kecamatan terlampir).

Dalam rangka menjamin Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional yang berkualitas, tersedianya data dan informasi Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional yang mencatat keseluruhan rangkaian kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional adalah sesuatu yang imperative sifatnya.

Hal ini tentunya perlu terus diupayakan penyempurnaan dan pengembangannya. Selain untuk menghasilkan kualitas data dan informasi, pengembangan system pencatatan dan pelaporan diharapkan dapat mengantisipasi tuntutan perubahan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional dengan Visi mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas 2018, dan Misi Mengarusutamakan pembangunan berwawasan Kependudukan, Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Hasil Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional Kabupaten Cilacap sebagai perwujudan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lini lapangan, maka untuk dapat diketahui perkembangannya perlu disajikan Laporan Umpan Balik , *feedback* Standart Pelayanan Minimal (SPM) Hasil Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Nasional dan informasi data Parameter Kependudukan di Kabupaten Cilacap.

Laporan Umpan Balik Tahun 2018 disusun bersumber dari Rekapitulasi Laporan Bulanan Klinik KB (F/II/KB/13) dan Laporan Pengendalian Lapangan Program Kependudukan dan KB Nasional Kecamatan (Rek.Kec.F/II/Dal/13) yang diterima oleh seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap dari UPT KB, PP dan PA, Koordinator PLKB Kecamatan dan Klinik Keluarga Berencana melalui sistem pelaporan online aplikasi.bkkbn.go.id/sr pelaporan kegiatan Kampung KB melalui website kampungkb.bkkbn.go.id serta juga melalui Email datinlcp@gmail.com. Selain itu sumber laporan ini diperoleh juga dari ***Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Kantor Kementerian Agama kabupaten cilacap dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap.***

Pembinaan melalui koordinasi dan bimbingan teknis kepada petugas lapangan KB oleh Kabupaten secara terus menerus, berjenjang dan berkesinambungan masih perlu ditingkatkan, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan keakuratan data dan informasi Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional di Kabupaten Cilacap.

BAB II
HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI DAN PENGENDALIAN
LAPANGAN PROGRAM KKBPK

A. Pelayanan Kontrasepsi

1. Cakupan Laporan

Pada Tahun 2018 semua Kecamatan atau 100 %, memberikan informasi tentang kegiatan Pelayanan Kontrasepsi melalui (Rek.Kab.F/II/KB/13), dengan cakupan laporan sebagai berikut :

- a. Jumlah KKB Pemerintah dilaporkan 42 (100 %) dari 42 Klinik yang ada.
- b. Jumlah KKB Swasta dilaporkan 11 (100 %) dari 11 Klinik yang ada.
- c. Jumlah DPS dilaporkan 66 (70,00 %) dari 86 DPS yang ada.
- d. Jumlah BPS dilaporkan 556 (91,64 %) dari 598 BPS yang ada.
- e. Jumlah jejaring faskes Kb lainnya 39 (72,22 %) dari 54 jejaring yang ada

2. Hasil Pelayanan Kontrasepsi

a. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru

Pada Tahun 2018, telah berhasil mengajak PUS untuk menjadi peserta KB Baru sebanyak **37.491** atau **64,78 %** dari sasaran PPM PB sebanyak **57.870** peserta. Peserta KB Baru tersebut apabila dirinci menurut metode kontrasepsi yang dipakai sebagaimana pada tabel 1 berikut :

Tabel. 1
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MENURUT METODE
KONTRASEPSI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

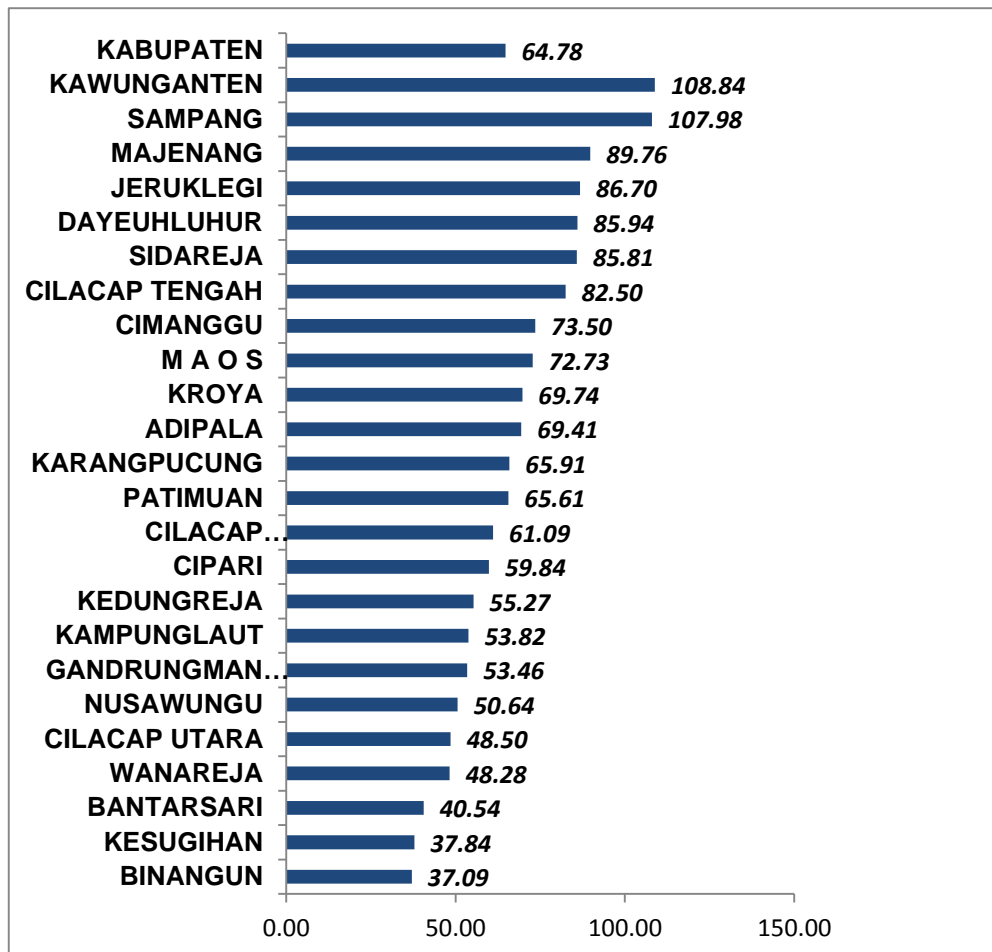
NO	MIX KONTRASEPSI	PPM/TARGET	REALISASI	PROSEN TASE
1	IUD	5.087	4.082	80,24
2	MOW	540	421	77,96
3	IMPLANT	9.946	8.495	85,41
4	SUNTIK	25.200	17.420	69,13
5	PIL	14.758	6.161	41,75
6	MOP	25	12	48,00
7	KONDOM	2.314	900	38,89
	JUMLAH	57.870	37.491	67,78

Prosentase Pencapaian Peserta KB Baru **tertinggi** dicapai **Kecamatan Kawunganten** yaitu **108,84 %** dari PPM Peserta KB Baru **1.572** atau sebanyak **1.711** akseptor dan **Kecamatan Sampang** yakni **58,11%** dari PPM Peserta KB Baru **1.328** atau sebanyak **1.434** akseptor.

Prosentase Pencapaian Peserta KB Baru **terendah** yaitu **Kecamatan Binangun** yaitu **37.09 %** dari PPM Peserta KB Baru **2.157** atau sebanyak **800** akseptor dan **Kecamatan Kesugihan** yakni **37,84 %** dari PPM Peserta KB Baru **4.611** atau sebanyak **1.745** akseptor .

Gambar 1.

Prosentase Pencapaian Peserta KB Baru Tahun 2018



b. Peserta KB Baru Menurut Jenis Kelamin

Hasil perolehan Peserta KB Baru Pria pada Tahun 2018 sebanyak 912 atau 38,99 % dari PPM Pria PB sebanyak 2.339. Peserta KB Baru Pria sebanyak 912 peserta terdiri dari MOP sebanyak 12 peserta atau 48,00 % dari total PB Pria MOP sebanyak 25 dan peserta KB Pria Kondom sebanyak 900 atau 38,89 % dari total PB Pria Kondom sebanyak 2.314.

Hasil perolehan Peserta KB Baru Wanita sebanyak 36.579 atau 65,87 % dari PPM PB Wanita sebesar 55.531 peserta.

Rincian peserta KB Baru menurut jenis kelamin Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.
PESERTA KB BARU MENURUT JENIS KELAMIN
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

NO	METODE KONTRA SEPSI	PB Pria	PPM PB Pria per mix	%	PB Wanita	PPM PB Wanita per mix	%
1	MOP	12	25	48,00			
2	Kondom	900	2.314	38,89			
3	IUD				4.082	5.087	80,24
4	MOW				421	540	77,96
5	Implant				8.495	9.946	85,41
6	Suntik				17.420	25.200	69,13
7	Pil				6.161	14.758	41,75
Jumlah		912	2.339	38,99	36.579	55.531	65,87

B. Pengendalian Lapangan

1. Cakupan Laporan

Laporan bulanan pengendalian lapangan Tahun 2018 berasal dari 24 Kecamatan (100%) dari 24 Kecamatan yang ada. Desa/Kelurahan yang melapor sebanyak 284 dari 284 Desa/Kelurahan yang ada (100%). PLKB/PKB/Petugas KB Desa yang melapor 93 atau (100 %) dari 93 PLKB/PKB/Petugas KB Desa yang ada. Untuk PPKBD yang melapor sebanyak 292 atau (100%) dari 292 PPKBD yang ada dan Sub PPKBD yang melapor

2.341 atau (100%) dari 2.341 Sub PPKBD yang ada. Jumlah kelompok KB yang melapor 10.484 atau (100 %) dari 10.484 Kelompok KB yang ada.

Berikut ini cakupan laporan kelompok-kelompok kegiatan yang melapor pada pada bulan Desember Tahun 2018 :

- a. Kelompok BKB yang melapor 345 atau (96,10 %) dari 359 kelompok BKB yang ada.
- b. Kelompok BKR yang melapor 250 atau (100 %) dari 250 kelompok BKR yang ada.
- c. Kelompok BKL yang melapor 375 atau (98,68 %) dari 380 kelompok BKL yang ada.
- d. Bulan ini PIK Remaja diketahui sejumlah 91 yang ada, sedangkan yang melapor sejumlah 91 atau 100 %. Berdasarkan klasifikasi PIK Remaja, maka dapat diketahui sebagai berikut :

1) PIK Remaja Tumbuh

Dari jumlah yang ada sebanyak 58 yang melaporkan kegiatan ada sebanyak 58 atau 100 %.

2) PIK Remaja Tegak

Untuk kelompok ini dari sejumlah 22 yang ada, yang melaporkan kegiatan bulan ini sebanyak 22 atau 100 %.

3) PIK Remaja Tegar

Pada kelompok PIK Remaja Tegar dari 11 kelompok yang ada, ada sejumlah 11 kelompok yang melapor atau 100 %.

2. Hasil kegiatan Operasional

Berdasarkan informasi Rek.Kab.F/1/Dal/13 dari Kecamatan yang melaporkan Tahun 2018 ini dapat diketahui frekuensi masing-masing kegiatan operasional sebagai berikut :

- a. Frekuensi Operasional Mupen Kecamatan
Jumlah operasional Mupen tahun ini tidak dilaksanakan karena peralatan MUPEN KB rusak berak dikarenakan usia peralatan yang sudah tua 9 (10 tahun) dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Frekuensi Rakor Program Kependudukan dan KB tingkat Kecamatan
Dari jumlah 24 Kecamatan yang ada, pelaksanaan Rakor Program Kependudukan dan KB tahun 2018 sebanyak 288 kali atau rata-rata tiap bulan sudah melaksanakan.
- c. Frekuensi Rakor Program Kependudukan dan KB tingkat Desa/Kelurahan
Pelaksanaan Rakor KB tingkat Desa/Kelurahan tahun ini mencapai 3.408 kali atau 100 % jika dibandingkan dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 284 Desa/Kelurahan dikalikan 12 bulan atau sebanyak 3.408.
- d. Frekuensi Penyuluhan Oleh PLKB/PKB
Kegiatan penyuluhan oleh PLKB/PKB terlaksana sebanyak 18.936 kali dibandingkan dengan jumlah PLKB/PKB yang ada sebanyak 93 maka mencapai 16,96 kali / bulan /PLKB.
- e. Frekuensi KIE dengan menggunakan KIE Kit
Operasional kegiatan KIE dengan KIE Kit terlaksana sebanyak 12.144 kali, dibandingkan dengan jumlah PLKB/PKB yang ada sebanyak 93 maka penggunaan KIE Kit mencapai 10,88 kali /bulan / PLKB.
- f. Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama/Adat yang aktif melakukan KIE KB
Dari 371 Tokoh/Toga/Todat yang aktif, telah melakukan KIE KB selama tahun 2018 sebanyak 4.464, maka rata-rata perbulan 1 kali/ tokoh.

- g. Frekuensi TKBK dari Kecamatan ke Desa/ Kelurahan Operasional pelayanan KB di Desa/ Kelurahan melalui kegiatan TKBK frekuensinya sebanyak 3.408 kali, dibandingkan dengan jumlah Desa/ Kelurahan sebanyak 284 maka setiap Desa/ Kelurahan operasionalnya mencapai 12 kali/tahun/ desa atau 1 kali/ bulan/ desa.

3. Pembinaan Ketahanan Keluarga

Dalam rangka memperkuat kesertaan ber-KB dari keluarga peserta KB yang memiliki anak balita, anak remaja dan anggota keluarga yang berusia lanjut, dilakukan upaya melalui kegiatan pembinaan ketahanan keluarga. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu Bina Ketahanan Keluarga Balita yang ditujukan kepada keluarga yang memiliki anak balita. Bina Ketahanan Remaja ditujukan pada keluarga yang memiliki anak remaja dan Bina Ketahanan Lansia ditujukan pada keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang berstatus usia lanjut (lansia).

Berikut ini gambaran pencapaian keluarga aktif kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia pada Tahun 2017 menurut Laporan Rek.Kab. F/I/Dal/13 bulan Desember 2018.

Tabel. 3

HASIL PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA TAHUN 2018

NO	U R A I A N	BKB	BKR	BKL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	88.995	107.788	83.773
2	Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	20.013	9.906	16.272
3	Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	14.880	6.888	10.775
4	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS	16.458	7.365	5.426
5	Jumlah PUS anggota kelompok yg menjadi Peserta KB	12.946	5.644	3.607
6	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS Keluarga Pra S dan KS I	7.915	3.855	3.105
7	Jumlah PUS anggota kelompok yg menjadi Peserta KB Keluarga Pra S dan KS I	4.962	2.437	1.923
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	343	253	344
9	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KKA	11.713		

4. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Dalam rangka memperkuat kesertaan ber-KB khususnya keluarga yang kurang mampu yaitu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dilakukan pembinaan dalam kelompok UPPKS. Dalam kegiatan UPPKS terdapat pembinaan ketrampilan usaha dan pemberian pinjaman modal usaha agar anggota UPPKS meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Pada Tahun 2018 menurut Laporan Rek.Kab. F/I/Dal/13 bulan Desember 2018 , di Kabupaten Cilacap tercatat sebanyak 329 kelompok yang melapor atau 100 % dari 329 kelompok yang ada. 6.101 anggota UPPKS Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I atau 56,59 % dari 10.887 anggota UPPKS seluruh tahapan keluarga. Pasangan Usia Subur seluruh tahapan Keluarga Sejahtera yang menjadi peserta KB sebanyak 5.978 atau 67,54 % dari 8.850 PUS anggota UPPKS seluruh tahapan. Untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I anggota UPPKS yang menjadi peserta KB sebanyak 3.312 atau 77,87 % dari 4.253 anggota UPPKS berstatus PUS keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Jumlah pertemuan kelompok UPPKS pada Tahun 2018 rata-rata sebanyak 1 kali pertemuan setiap bulan. Setiap pertemuan kelompok UPPKS dihadiri 25 s/d 30 anggota kelompok UPPKS.

5. Pembinaan Peserta KB Aktif

a. Peserta KB Aktif

Berdasarkan laporan Pengendalian Lapangan dari 24 Kecamatan pada Tahun 2018, Kabupaten Cilacap berhasil membina keluarga yang menjadi peserta KB Aktif sebanyak 257.617 atau 69,23 % dari PUS sebesar 372.116 atau 116,80 % terhadap PPM PA sebesar 220.565, sedangkan peserta KB Aktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I sebanyak 108.189 atau

68,18 % dari PUS Keluarga Pra KS dan KS I sebanyak 168.673 atau 41,99 % dari Peserta KB aktif seluruh keluarga. Peserta KB Aktif jalur Pemerintah sebanyak 161.243 atau 62,59 % dari jumlah peserta KB Aktif sedangkan Peserta KB Aktif jalur Swasta sebanyak 96.388 atau 37,41 % dari jumlah peserta KB Aktif.

b. Peserta KB Aktif Pria dan Wanita

Peserta KB Aktif Pria sebanyak 9.575 atau 3,72 % dari total Peserta KB Aktif sebanyak 257.617 dan 82,54 % dari PPM Peserta KB Aktif Pria sebanyak 11.601. Sedangkan Peserta KB Aktif Wanita sebanyak 248.042 atau 96,28 % total Peserta KB Aktif sebanyak 257.617 dan mencapai 118,70 % dari PPM Peserta KB Aktif Wanita sebanyak 208.964.

Peserta KB Aktif seluruh Keluarga dan Keluarga Pra S dan KS I menurut Metode Kontrasepsi sebagaimana tersebut pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4.
PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI

NO	METODE KONTRASEPSI	JUMLAH SELURUH PESERTA KB AKTIF (P A)	% P A THD PUS	PPM PA	% THD PPM P A	JMLH PA KELUARGA Pra S & KS I	% THD PA SLRH THPN KLG
1	IUD	31.910	8,57	22.018	114,93	12.754	39,97
2	MOW	7.237	1,94	6.768	106,93	3.116	43,05
3	MOP	1.256	0,34	596	210,74	523	41,64
4	KONDOM	8.319	2,23	11.005	75,59	3.085	37,08
5	IMPLANT	41.568	11,17	24.380	170,50	17.591	42,32
6	SUNTIK	112.992	30,36	106.674	105,92	42.292	37,43
7	PIL	54.335	14,60	49.124	110,61	28.828	53,05
JUMLAH		257.617	69,23	220.565	116,80	108.189	41,99

c. Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB

PUS tidak ber KB di Kabupaten Cilacap sebanyak 114.499 atau 30,77 % dari PUS yang ada sebanyak 372.116

Pasangan Usia Subur

Tabel. 5

PUS TIDAK BER KB KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

NO	PUS BUKAN PESERTA KB	JUMLAH	% DARI PUS	% PUS TIDAK KB	JUMLAH PUS TDK KB KEL. PRA S & KS I	% PUS TDK KB KEL PRA S & KS I THD PUS SELURUH THPN KLG	% PUS TIDAK KB KEL PRA S & KS I THD PUS KEL PRA S & KS I
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Hamil	13.097	3,52	11,44	6.217	1,67	3,91
2	Ingin Anak Segera	53.323	14,33	46,57	25.052	6,73	15,78
3	Ingin Anak Ditunda	24.358	6,54	21,27	9.881	2,65	6,23
4	Tidak Ingin Anak Lagi	23.721	6,37	20,72	9.334	2,50	5,8
	JUMLAH	114.499	30,77	100,00	47.983	12,89	31,82

d. Unmetneed

Unmetneed Tahun 2018 sebesar 46.061 atau 12,78 % dari PUS yang ada 360.379. Dari jumlah tersebut dapat dirinci PUS yang tidak ber KB karena Ingin Anak Ditunda (IAT) sebesar 24.358 dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebanyak 23.721. Prosentase unmetneed tertinggi di Kecamatan Sampang sebesar 20,10 % dan yang terendah Kecamatan Majenang sebesar 3,14 %.

e. Peserta KB Drop Out (DO)

Perolehan peserta KB Baru merupakan hasil kinerja dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana, meningkatnya peserta KB Baru merupakan indikator keberhasilan Petugas Lapangan dalam mengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang ada di wilayah kerjanya.

Meningkatnya peserta KB merupakan gambaran bahwa Keluarga Berencana menjadi kebutuhan masyarakat. Perolehan Peserta KB Baru belum seluruhnya akan meningkatkan kesertaan KB aktif tanpa ada pembinaan secara rutin oleh Petugas Lapangan KB, yang pada akhirnya akan menambah angka Drop Out (DO).

Tabel. 6
PESERTA KB DROP OUT KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

NO	METODE KONTRASEPSI	PA DES 2017	PB TAHUN 2018	PA SEHARUS NYA	PA DES 2018	DROUP OUT	DELTA	RASIO DUKUNGAN	% DO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=3+4	(6)	(7)=5-6	(8)=6-3	(9)=4/8	(10)=7/6
1	IUD	31,093	4,082	35,175	31,910	3,265	817	5.00	10.23
2	MOW	7,223	421	7,644	7,237	407	14	30.07	5.62
3	IMPLANT	38,502	8,495	46,997	41,568	5,429	3,066	2.77	13.06
4	SUNTIKAN	122,795	17,420	140,215	112,992	27,223	-9,803	-1.78	24.09
5	PIL	57,991	6,161	64,152	54,335	9,817	-3,656	-1.69	18.07
6	MOP	1,385	12	1,397	1,256	141	-129	-0.09	11.23
7	KONDOM	8,749	900	9,649	8,319	1,330	-430	-2.09	15.99
	TOTAL	267,674	37,491	305,165	257,617	47,548	-10,057	5.63	18.46

Rasio dukungan **Peserta KB Baru** terhadap Pencapaian **Peserta KB Aktif** sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- Peserta KB Aktif Desember 2018 = 267.674
- Perolehan PB s.d Desember 2018 = 37.491
- Peserta KB Aktif seharusnya = 305.165
- Peserta KB Aktif Desember 2018 = 257.617
- Droup Out kasar sebesar = 47.548
- Delta PA Januari s.d Desember 2018 = -10.057
- % Droup Out Peserta KB Aktif = 18,46 %
- Rasio dukungan PB terhadap PA = 5.63

Artinya untuk menambah 1 (satu) Peserta KB Aktif membutuhkan 5 sampai 6 Peserta KB Baru, kondisi ini termasuk kategori yang sangat memprihatinkan dengan tingkat efektifitas rendah sekali. Adapun secara rinci sebagaimana *terlampir*.

6. ANALISA INDIKATOR KINERJA SPM – KB/KS

Bagian ini memberikan ulasan terhadap hasil pencapaian indikator kinerja standar pelayanan minimal Bidang KBKS. Prinsip pengukuran pencapaian indikator adalah persentase antara nilai indikator ideal dengan realisasi hasil yang di capai dan membandingkan dengan hasil akhir penilaian masing-masing Kecamatan.

Tabel. 7

**HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018**

NO	INDIKATOR	STANDART SPM (%)	HASIL EVALUASI	STANDART NILAI ANALISIS	HASIL ANALISIS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Persentase Perkawinan yang Istrinya berusia < 20 tahun	10	15,86	100	63,04
2	Persentase PUS yang IstriNYA berusia < 20 tahun	3,5	0,8	100	463,82
3	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	65	69,23	100	106,51
4	Persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need)	9	12,92	100	69,66
5	Persentase PUS Keluarga anggota BKB yang ikut KB	70	78,66	100	112,37
6	Persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB	87	67,55	100	77,64
7	Rasio PKB/PLKB di Desa/Kel	2	3.1	100	65,49
8	Rasio PPKBD di Desa/Kel	1	1	100	100
9	Cakupan Penyediaan ALKON untuk memenuhi Permintaan Masyarakat	30	0	100	0,00
10	Cakupan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa /Kelurahan	100	100	100	100,00
T O T A L				1.000	1.158,53

- a. Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun dengan standar ideal yang telah ditetapkan adalah 10 %. Tahun 2018 di Kabupaten Cilacap ada 20.299 (sumber data : Kantor Kemenag kabupaten Cilacap dan Disdukcapil Kabupaten Cilacap Tahun 2018) perkawinan, 3.220 diantaranya adalah perkawinan yang umur istri < 20 tahun atau ada 15,91 %. Persentase ini diatas ideal ,sehingga dapat di katakan bahwa persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun relative cukup besar sehingga dapat di katakan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal KBKS di Kabupaten Cilacap. Standart penilaiannya 100 , nilai untuk tingkat Kabupaten Cilacap 63,04 artinya masih jauh dari standart nilai analisis.
- b. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya berusia < 20 tahun dengan standart ideal yang ditetapkan yakni 3,5 % , sedangkan realisasi Kabupaten Cilacap 0,7 % artinya Kurang memenuhi SPM. Dengan standart penilaian 100 capaian Kabupaten Cilacap sudah diatas standart yakni 463,82.
- c. Prevalensi Peserta KB Aktif dengan standar ideal 65%, sedangkan realisasi Kabupaten Cilacap 69,23 %, berarti sudah diatas standart .Hasil penilaian tngkat kabupaten menunjukkan angka 106,51 ini berarti sudah memenuhi target dalam arti standar pelayanan minimal dapat di penuh yaitu 100.
- d. Presentase PUS yang termasuk dalam kategori unmet need dengan standar ideal 9%, sedangkan realisasi rata-rata Kabupaten Cilacap menunjukkan 12,92 dan hasil penilaian menunjukkan angka 69,66. Ini berarti jauh dari angka ideal yaitu 100, yang artinya standar pelayanan minimal belum dapat di capai.

- e. Prevalensi Peserta KB Aktif PUS anggota BKB dengan standar ideal 70%, sedangkan realisasi Kabupaten Cilacap 78,66 %, berarti sudah di atas standart. Hasil penilaian menunjukkan angka 112,37, ini berarti sudah memenuhi target bahkan lebih dalam arti standar pelayanan minimal dapat di penuhi yaitu 100.
- f. Prevalensi Peserta KB Aktif PUS anggota UPPKS dengan standar ideal 87 %, sedangkan realisasi Kabupaten Cilacap 67,55 %, berarti masih dibawah standart. Hasil penilaian menunjukkan angka 77,64. ini berarti belum memenuhi target dalam arti standar pelayanan minimal dapat di penuhi yaitu 100.
- g. Rasio PLKB/PKB di desa/kelurahan dengan standart ideal 2, di Kabupaten Cilacap tahun 2018 rasionya 3,1 berarti belum memenuhi standart ideal. Hasil penilaian dengan standart nilai analisis 100, di Kabupaten Cilacap baru 65,49 artinya belum memenuhi nilai analisis SPM.
- h. Rasio PPKBD di desa/kelurahan dengan standart ideal 1, di Kabupaten Cilacap tahun 2018 rasionya 1 berarti sudah memenuhi standart ideal. Hasil penilaian dengan standart nilai analisis 100, di Kabupaten Cilacap nilainya sudah 100 artinya sudah memenuhi nilai analisis SPM.
- i. Cakupan penyediaan Alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat baik untuk Peserta KB Baru maupun Peserta KB Aktif dengan standart 30 %, sampai tahun 2018 ini Kabupaten Cilacap dukungannya masih nihil atau 0. Artinya perlu komitmen yang sungguh-sungguh dan kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menganggarkan APBDnya guna memenuhi sebesar 30 % dari Alkon yang dibutuhkan.

- j. Persentase Desa/Kelurahan yang mempunyai data mikro keluarga dan penduduk dengan standar ideal 100 %, sedangkan realisasi Kabupaten Cilacap menunjukkan 100 % .Hasil analisis juga menunjukkan angka 100 . Ini berarti sudah memenuhi target yaitu 100 yang berarti standar pelayanan minimal sudah dapat dipenuhi.

7. PARAMETER KEPENDUDUKAN

a. Cakupan dan Sumber Data

Mulai Tahun 2012 ,Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap menyajikan Data Parameter Kependudukan. Adapun data dasar berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik), Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dan sumber lain yang diperlukan.

b. Data Jumlah Penduduk Dan Kelahiran

Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap menurut Hasil Data Dasar Kabupaten Cilacap Tahun 2018 sebanyak 1.842.913 jiwa terdiri dari Laki-laki sejumlah 934.014 jiwa dan Perempuan 908.899 jiwa.

Secara Sex Ratio cukup berimbang antara penduduk Perempuan dengan Laki – laki yakni 1,028. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel. 8
DATA JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KELAHIRAN
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah Penduduk	1.842.913
	- Laki - Laki	934.014
	- Perempuan	908.899
2	Sex Ratio	1,028
3	Jumlah Kelahiran	28.621

Bagi kita yang menarik adalah trend naik yang cukup signifikan untuk angka kelahiran absolut dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2018. Tahun 2015 trend turun sebesar 1,62 %, sedangkan pada Tahun 2017 trend turun sebesar 2,31 %, pada tahun 2018 trend naik sebesar 0,48 % seperti dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9

**DATA JUMLAH KELAHIRAN KABUPATEN CILACAP
DARI TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2	3
1	2004	14.078
2	2005	14.470
3	2006	14.980
4	2007	17.723
5	2008	28.942
6	2009	29.289
7	2010	29.049
8	2011	29.600
9	2012	30.564
10	2013	29.652
11	2014	30.023
12	2015	29.535
13	2016	28.853
14	2017	28.481
15	2018	28.621

c. RASIO PARAMETER KEPENDUDUKAN

Dari hasil analisis data kependudukan kemudian dikomparasikan dengan kebijakan pemerintah dibidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang Tahun 2018. Kondisi Kabupaten Cilacap cukup memprihatinkan, dimana TFR Kabupaten Cilacap Hasil susenas 2015 adalah 2,56 dan untuk menurunkan menjadi 2,1 pada tahun 2018 ini merupakan pekerjaan yang berat. Beberapa parameter kependudukan dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10.

**PARAMETER KEPENDUDUKAN KABUPATEN
CILACAP
TAHUN 2018**

NO	INDIKATOR	RASIO
1	2	3
1	CBR	15,53
2	TFR (Susenas 2015)	2,56
3	LPP	0,5
4	Density	862

BAB III

KAMPUNG KB

A. Latar Belakang

Dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dimana kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah pengendalian penduduk. Dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 semakin mempertegas kewenangan tersebut maka pemerintah Kabupaten menegaskan pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 4 (empat) sub bidang yaitu:

1. Sub urusan pengendalian penduduk,
2. Sub urusan Keluarga Berencana,
3. Sub urusan Keluarga Sejahtera, dan
4. Sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi.

Pembangunan pemerintah periode 2015-2019, BKKBN diberi mandat melalui Agenda program Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia". Landasan hukum diatas dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategi (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019, dengan 6 (enam) strategi yang telah ditetapkan;

1. Menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat nasional (persen pertahun) dari 1,38 persen/tahun tahun 2015 menjadi 1,21 persen pertahun 2019;

2. Menurunnya total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019;
3. Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metode dari 65,2 persen menjadi 66 persen;
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019;
5. Menurunnya Age Spesific Fertility Rate (ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun 2019;
6. Menurunnya presentase kehamilan yang tidak diinginkan dari wanita usia subur 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019. Dengan melihat kembali program pemerintah selama 2-3 tahun terakhir dimana pada tahun 2012 TFR Jawa Tengah mencapai 2,1 persen namun pada tahun 2015 TFR Jawa Tengah naik menjadi 2,6 persen per tahun.

Berdasarkan permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus dengan melemahnya program dan implementasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak Presiden RI, terutama untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (kampung KB). Kampung KB telah dicanangkan di Tingkat Nasional di Jawa Barat di Kabupaten Cirebon oleh Presiden RI, kemudian pencaangan Kampung KB Tingkat Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap oleh Gubernur berlokasi di Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi, adapun pencaangan Kampung KB Tingkat

Kabupaten Cilacap oleh Kaper BKKBN Provinsi Jawa Tengah di Desa Mujur Kecamatan Kroya.

Kampung KB menjadi salah satu inovasi startegis untuk dapat menggemakan kembali program KB umumnya di wilayah Kabupaten Cilacap dan khususnya di Desa desa di seluruh Kabupaten Cilacap.

Mendengar istilah “ Kampung ”,kesan yang muncul di pikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, kolot, kumuh, terpencil, dan beberapa sebutan lainnya yang terkait dengan kampung. Memangtidak dapat kita pungkiri, bahwa kampung sangat identik dengan istilah-istilah seperti itu, begitu juga halnya dengan istilah Kampung KB yang akhir-akhir ini menjadi ikon yang cukup populer tidak hanya dikalangan para pengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam hal ini BKKBN, akan tetapi juga banyak diperbincangkan oleh lembaga-lembaga departemen ataupun non departemen mulai dari tingkat daerah sampai ketinggian pusat.

Memang, sejak Kampung KB ini dicanangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan januari 2016, bahwa Kampung KB ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kepada masyarakat kalangan elit, dan bahkan tulisan-tulisan mengenai kampung KB banyak mengisi kolom-kolom pemberitaan dimedia massa (surat khabar, majalah, tabloid) dan bahkan menjadi pemberitaan yang cukup hangat dan populer di media-media elektronik.Lantas kenapa kampung KB ini dibentuk, ada beberapa hal yang melatar belakanginya, yaitu :

1. Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru.

2. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
3. Penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
4. Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacitaterutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu : "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia ".
5. Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

B. Manfaat

1. Dalam mendukung reformasi birokrasi bagi desa
Terwujudnya Pembentukan Kampung KB yang lebih baik, good governance dapat betul-betul tercapai sesuai dengan program BKKBN, bagi pemerintah dan masyarakat desa dapat membantu tugas dan fungsi Kepala Desa tentang program KKBPK.
2. Bagi OPD KB dan pemerintah dalam kualitas pelayanan pada masyarakat akan mempercepat dan mempermudah penyampaian informasi pada masyarakat dalam segala bidang.
3. Bagi Stakeholders / pengguna
Dengan terbentuknya Kampung KB di 81 desa di 24 kecamatan se kabupaten Cilacap sampai Bulan Desember 2018 yang didalamnya mencakup sumber daya manusia, maka akan lebih mudah bagi stakeholder pemanfaat apabila sewaktu-waktu membutuhkan sumber daya manusia yang potensial yang ada di wilayah kampung KB.

C. Tujuan Dibentuknya Kampung KB

Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPk serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPk dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

D. Syarat-syarat Pembentukan Kampung KB

Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu :

Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat.

Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.

Ketiga, partisipasi aktif masyarakat,

E. Kriteria Wilayah Kampung KB

Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :

1. Kriteria utama : yang mencakup dua hal: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.

2. Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu) :

- a. Kumuh.
- b. Pesisir.
- c. Daerah Aliran Sungai (DAS),
- d. Bantaran Kereta Api,
- e. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan),
- f. Terpencil,
- g. Perbatasan,
- h. Kawasan Industri,
- i. Kawasan Wisata,
- j. Padat Penduduk.

Selanjutnya dalam menentukan kriteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh kriteria yang ada.

3. Kriteria Khusus : yang mencakup 5 hal, yaitu :

- a. kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga,
- b. Kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah,
- c. Kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan.
- d. Kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah,

- e. Kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.

F. Sasaran Kegiatan Kampung KB

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agamat, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian.

Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPK tahun 2015-2019, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB.

Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPk dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung, karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju, apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu negarapun akan menjadi maju.

G. Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat

Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat.

Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu ”satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program

KKBPk dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis”.

Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPk guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat.

Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya, sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.

H. Sosialisasi dan Advokasi Kampung KB

Pembentukan Kampung KB diawali dengan Sosialisasi kampung KB kepada semua petugas lini lapangan pengelola Program KKBPk dan kemudian disosialisasikan di tingkat kecamatan serta diteruskan di tingkat desa. Pada tahapan ini Para pengelola program KKBPk di lini lapangan mengadvokasi stakeholder di tingkat kecamatan dan secara berjenjang di tingkat desa.

Pengelola program KKBPk atau PLKB juga melakukan koordinasi dengan para stakeholder secara berjenjang untuk

mendapat dukungan dan membangun komitmen serta persepsi yang sama terhadap apa yang dimaksud dan yang menjadi tujuan dibentuknya Kampung KB, sehingga para stakeholder memahami dan memberi dukungan serta komitmen yang mantap atas terbentuknya Kampung KB.

Di saat bersamaan PLKB juga bersama-sama dengan stakeholder baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Desa melakukan KIE Kampung KB kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan formal ataupun kelompok maupun pertemuan yang bersifat formal perorangan dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam rangka mensosialisasikan kampung KB.

Dalam melakukan sosialisasi Kampung KB ke stakeholder khususnya di Desa, PLKB juga melakukan advokasi berkenaan dengan penganggaran pembentukan kampung KB agar dapat tertuang dalam APBDesa sehingga percepatan pembentukan Kampung KB dapat segera terwujud.

I. Penunjukan Lokasi Kampung KB

Setelah melalui proses sosialisasi dan advokasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, PLKB berkoordinasi dengan Stakeholder desa yang terpilih setelah mendapat rekomendasi dari stakeholder di tingkat kecamatan.

Sementara itu, dalam proses pembentukannya, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB memperhatikan persyaratan yang wajib dipenuhi, yaitu tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat.

Hal ini diperlukan, sebab keberhasilan ketercapaian indikator Kampung KB ditentukan oleh indikator input, proses dan output. Dalam proses, misalnya ditandai dengan jumlah Penyuluh Keluarga

Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB) yang proporsional, ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk program KKBPk dari APBD dan APBN maupun sumber dana lain, seperti PNPM, Anggaran Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas atau Jamkesda, ketersediaan sarana operasional baik kontrasepsi maupun sarana pendukung lainnya.

Penentuan lokasi kampung KB di tingkat RW atau dusun melalui rapat dengan para stakeholder dan masyarakat dengan memperhatikan kriteria-kriteria tentang pembentukan kampung KB sesuai dengan juknis dan juklak Kampung KB dari BKKBN pusat dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB.

J. Proses Pembentukan Kampung KB

Setelah lokasi Kampung KB ditentukan dan disepakati bersama oleh semua stakeholder dan masyarakat di desa yang menjadi lokasi kampung KB dimulailah proses sosialisasi tentang maksud dan tujuan kampung KB kepada masyarakat dimana lokasi kampung KB itu berada secara intensif dan berkesinambungan dengan harapan masyarakat terpapar tentang apa dan bagaimana kampung KB.

Selanjutnya dimulai proses pembentukan dan penyusunan struktur kelompok kerja kampung KB dan pengurus atau seksi kelompok-kelompok kegiatan yang menjadi wadah semua kegiatan cakupan program KKBPk dan program lintas sektoral.

Kepengurusan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di kampung KB dengan tetap memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam juklak dan juknis kampung KB. Secara garis besar proses pembentukan Kampung KB sebagai berikut :

Kampung KB di bentuk pada tingkatan wilayah desa/ kelurahan atau dusun / rukun warga yang memenuhi kriteria- kriteria pemilihan wilayah dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya di kelola oleh wilayah dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya di kelola oleh kelompok kerja kampung KB yang terdiri atas:

1. Pelindung : Bupati / Walikota
2. Penasehat : Kepala SKPD/OPD-KB kab., / kota
3. Pembina : Camat
4. Ketua : Kepala Desa/ Lurah
5. Sekretaris : PKB/PLKB
6. Bendahara : Ketua PKK tingkat desa/kelurahan
7. Pelaksana operasional : PKB/PLKB, Kader, PPKBD/
SubPPKBD, PosKB

Adapun kelompok kegiatan (poktan) dalam kampung KB terdiri dari:

1. Forum musyawarah : BPD, LPMD, Toga, Toma, Todat dan lain-lain
2. Petugas lini lapangan : PLKB, Bidan, TP PKK, PPL dan Petugas Lapangan instansi terkait.
3. Poktan Kader-kader per bidang sesuai kebutuhan progam kader per bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah kampung KB (misal: Poktan Kader KKBPk, Poktan Kader Bidang Kesehatan)

Untuk legalitas maka kepengurusan Kampung KB disahkan oleh Kepala Desa /Kelurahan dengan SK Kepala Desa/Kelurahan. Selanjutnya untuk kesinambungan dan pengembangan kegiatan dilaksanakan rapat koordinasi secara rutin melalui forum musyawarah.

Hal-hal terkait koordinasi kemitraan lintas sektor ditindaklanjuti melalui rakor Poktan Kader (per bidang) yang pelaksanaan kegiatan

berikutnya dan salah satu bahan perencanaan pengembangan kegiatan yang akan datang.

Tahapan Kampung KB berikutnya adalah :

1. Membangun Komitmen

Pembentukan Kampung KB perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dukungan politis, teknis dan operasional. Membangun komitmen adalah untuk menjadikan Kampung KB sebagai Program/kegiatan yang menjadi urusan bersama, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat konsisten dan berkesinambungan.

2. Penyusunan Profil Kampung KB

Pokja Kampung KB menyiapkan profil kampung KBnya yang akan ditetapkan sebagai kampung KB di RW atau Dusun. Untuk dilaporkan kepada OPD KB Kabupaten yang terdiri dari:

- a. Luas dan Letak Geografis wilayah Kampung KB.
- b. Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB.
- c. Data demografi wilayah Kampung KB (Jumlah Penduduk per kelompok umur, jumlah KK, Tingkat Pendidikan dan lain-lain).
- d. Data KB (jumlah PUS, jumlah PB, jumlah PA, Unmetneed, dan lain-lain).
- e. Data Sosial Ekonomi wilayah (Data Tahapan KS, Penerima bantuan modal dan lain-lain).

3. Proses penetapan wilayah sebagai kampung KB

a. Rapat penetapan wilayah kampung KB

Dilaksanakan oleh PLKB dengan melibatkan Stakeholder di tingkat Desa dan Tokoh Masyarakat , termasuk penetapan Poktan Kader per Bidang yang di sesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

b. Penyusunan struktur organisasi.

Dilaksanakan oleh Pokja Kampung KB dan di sahkan melalui surat keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

- c. Rekapitulasi wilayah kampung KB beserta SK struktur organisasinya di kirimkan ke OPD KB Kabupaten.

4. Penyediaan Data Informasi

Adapun kelengkapan data dan informasi yang di perlukan dalam pembentukan kampung KB adalah sebagai berikut:

- a. Data Anggota Keluarga/ Data individu
- b. Meliputi jumlah jiwa dalam keluarga, nomor kode anggota keluarga, nama, alamat, hubungan dengan kk, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dll.
- c. Data informasi yang terkait dengan catatan sipil.
- b. Data dan informasi terkait dengan poktan kader per bidang, di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah kampung KB.

Melalui koordinasi yang di pimpin oleh ketua, setiap petugas lini lapangan (PLKB/PKB/TPD/PKK) agar memanfaatkan data mikro keluarga(R/I/KS dan R/I/MDK serta R/I/PUS) sebagai sumber untuk memahami potensi dan permasalahan desa / kelurahan binaannya.

Data mikro yang ada tersebut dipergunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi untuk menentukan sasaran, potensi dan permasalahan baik yang berkaitan dengan program KKBPK maupun bidang lintas sektor lainnya yang di butuhkan di wilayah kampung KB.

Data yang sudah di analisis menjadi materi informasi bagi SKPD-KB, ketua kampung KB dan PKB /PLKB untuk di sosialisasikan dan di diskusikan melalui forum Musyawarah yang melibatkan masyarakat, ketua RW/RT, aparat pemerintah desa / Kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat dan para mitra kerja/

stakeholders untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan perencanaan kegiatan kampung KB.

Setelah proses tersebut dilaksanakan secara bertahap terbentuklah calon Kampung KB di Desa yang sudah siap untuk dicanangkan menjadi kampung KB dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati serta tertuang dalam Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) setiap tahunnya.

K. Koordinasi dan Advokasi kepada stakeholder

Setelah melalui proses sosialisasi dan advokasi awal kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, PLKB berkoordinasi dengan Stakeholder desa dan melakukan advokasi mengenai pengalokasian anggaran kampung KB dalam APBDesa melalui mekanisme musrenbangdes. Hal itu penting karena menyangkut keberlangsungan kampung KB ke depannya.

Di sisi lain menghadapi rencana penancangan kampung KB, PLKB dan pengurus/pokja kampung KB secara intensif selalu berkoordinasi untuk mendapat dukungan dari stakeholder di tingkat desa.

Hasil dari Advokasi dan Assistensi Program KKBPK kepada Stakeholder desa sebagaimana terlampir.

L. Pencanaan Kampung KB

Sampai tahun 2018 secara bertahap kampung KB yang telah dibentuk sejumlah 81 Desa di 24 Kecamatan se Kabupaten Cilacap yang dicanangkan oleh Bupati, Kepala Dinas KB,PP dan PA, ketua TP PKK dan Camat serta dihadiri oleh instansi terkait.

Pencanaan Kampung KB ini membangkitkan kembali euforia program KKBPK yang selama ini terpinggirkan. Kampung KB

merupakan momentum untuk menggairahkan program KKBPk agar mendapat tempat di masyarakat.

Setelah penancangan kampung KB semua kegiatan yang ada di wilayah kampung Kb tersebut tetap melaksanakan kegiatannya secara berkala, berkelanjutan serta tetap mengembangkan kampung KB disesuaikan dengan kearifan lokalnya sehingga apa yang menjadi tujuannya tercapai dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kampung KB tersebut secara khusus dan masyarakat desa secara umum. Adapun Lokasi Kampung KB tersebut sebagaimana terlampir bersama laporan ini.

M. Intervensi Kegiatan

Setelah penentuan lokasi kampung KB mulai dilakukan intervensi kegiatan di kampung KB kepada kelompok kegiatan yang ada di kampung KB yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja kampung KB berkaitan dengan program KKBPk dan program lintas sektoral yang dibutuhkan di Kampung KB
2. Penyuluhan KIE Program KKBPk secara rutin pada individu dan kelompok PUS, Peserta KB Aktif dan MKJP.
3. Peningkatan kapasitas kader poktan di kampung KB
4. Peningkatan kualitas pertemuan kelompok Tri Bina (BKB, BKR dan BKL)
5. Peningkatan kualitas pertemuan kelompok UPPKS
6. Peningkatan kualitas pertemuan PIK-RM
7. Koordinasi dan konsolidasi melalui pertemuan Pokja Kampung KB
8. Sosialisasi dan KIE/Advok 8 fungsi keluarga kepada masyarakat di kampung KB

N. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi

Secara berkala Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas KB,PP dan PA Kabupaten Cilacap melakukan Bimbingan teknis pengelolaan Kampung KB kepada para pengelola Kampung KB.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan Kampung KB dilakukan dengan melihat langsung kondisi kampung KB di lapangan serta melalui website dengan alamat ***http://www:kampungkb.bkkbn.go.id*** .

O. Regulasi Bupati

Tahun 2018 Bupati Cilacap mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 90 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di kabupaten Cilacap sebagai pedoman, pengelolaan dan pengembangan Kampung KB di Kabupaten Cilacap.

Perbup Cilacap ini menjadi landasan hukum dan kebijakan terhadap pengembangan Kampung KB di Kabupaten Cilacap nantinya, sehingga perkembangan kampung KB di Cilacap terwujud seperti apa yang diharapkan sesuai dengan Perbup Cilacap no 90 tahun 2018.

P. Pengembangan Kampung KB

Dengan ditetapkannya Kampung KB 'GADIS' RW 04 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap sebagai Center Of Excellence (CoE) atau Pusat Layananan Unggulan Kampung KB di Provinsi Jawa Tengah melalui SK Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor : 8688/HK.02.02/J.5/2018 tentang Pembentukan Center of Excellence Kampung Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memacu pengembangan model kampung KB sesuai dengan kampung KB Gadis.

Dinas KB,PP dan PA Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 telah melakukan pengembangan Kampung KB model di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kampung KB Dusun Cikuya Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari, Kampung KB Dusun Bendakulon Desa Padangjaya Kecamatan Majenang dan Desa Karangjati Kecamatan Sampang. Dan juga telah melatih 8 orang PLKB sebagai fasilitator Kampung KB tingkat Kabupaten Cilacap yang berperan memfasilitasi bimbingan teknis pembentukan kampung KB.

Menjadikan Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang mustahil dan untuk mewujudkan harapan tersebut tidak cukup hanya dengan membuat kesepakatan atau komitmen diatas kertas, namun perlu ketekunan, kesabaran, kebersamaan serta kerja keras yang diaplikasikan dalam wujud nyata, lebih-lebih membangun masyarakat pinggiran.

Tapi dengan kebersamaan pasti semuanya akan lebih mudah diatasi, karena membangun masyarakat dari pinggiran bukanlah semata-mata harapan, melainkan lebih kepada bagaimana memposisikan Program KKBPK sebagai upaya membangun kesejahteraan dengan prioritas masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Inilah wujud dari niat, komitmen, tekad yang kuat serta determinasi yang tinggi untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun sumber daya manusia yang berkualitas hanya mungkin tercipta apabila ada kompetensi, ada pembinaan yang sungguh-sungguh, dan Kampung KB inilah yang diharapkan dapat menjadi wahana untuk hal tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa

dan kelurahan); intensitas opini publik tentang program KKBPk beserta integrasinya dengan lintas sektor; optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/stakeholders; semangat dan dedikasi para pengelola program di seluruh tingkatan wilayah serta para petugas lini lapangan KB (PKB/PLKB); dan partisipasi aktif masyarakat.

Karenanya, menjadi kewajiban bagi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan, demi terwujudnya agenda-agenda pembangunan KKBPk sebagaimana diamanatkan dalam Nawacita. Semoga.

BAB IV

PENUTUP

Demikian hasil laporan cakupan hasil pelaksanaan, Standart Pelayanan Minimal (SPM) , Parameter Kependudukan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Cilacap dan pelaksanaan Program Kampung KB Tahun 2018 dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang telah dicapai di masing-masing Kecamatan.

Harapan kami informasi kegiatan tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu masukan untuk Perencanaan Operasional Program pada periode berikutnya berupa analisis dan Penilaian serta Pengendalian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di masing-masing tingkatan wilayah.

LAMPIRAN

ASPEK : PEMANTAUAN PELEMBAGAAN DAN JEJARING KB
 INDIKATOR : CAKUPAN LAPORAN KEADAAN UMUM
 BULAN : DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	Jumlah Kecamatan		Jumlah PPLKB/ Petugas KB		Jumlah Desa/Kelurahan		Jumlah PLKB/PKB/Petugas		Jumlah P P K B D		Jumlah Sub PPKBD		Jumlah Kelompok KB	
		yang ada	yang dilaporkan	yang ada	yang dilaporkan	yang ada	yang dilaporkan	yang ada	yang dilaporkan	yang ada	yang dilaporkan	yang ada	yang dilaporkan	yang ada	yang dilaporkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	KEDUNGREJA	1	1	-	-	11	11	2	2	11	11	93	93	485	485
2	KESUGIHAN	1	1	-	-	16	16	6	6	16	16	156	156	690	690
3	ADIPALA	1	1	-	-	16	16	6	6	16	16	118	118	515	515
4	BINANGUN	1	1	-	-	17	17	4	4	17	17	110	110	363	363
5	NUSAWUNGU	1	1	-	-	17	17	5	5	17	17	119	119	451	451
6	KROYA	1	1	-	-	17	17	4	4	17	17	111	111	550	550
7	M A O S	1	1	-	-	10	10	4	4	10	10	66	66	263	263
8	JERUKLEGI	1	1	-	-	13	13	5	5	13	13	84	84	436	436
9	KAWUNGANTEN	1	1	-	-	12	12	2	2	12	12	88	88	468	468
10	GANDRUNGMANGU	1	1	-	-	14	14	4	4	14	14	88	88	583	583
11	SIDAREJA	1	1	-	-	10	10	2	2	10	10	54	54	299	299
12	KARANGPUCUNG	1	1	-	-	14	14	2	2	14	14	107	107	417	417
13	CIMANGGU	1	1	-	-	15	15	3	3	15	15	107	107	446	446
14	MAJENANG	1	1	-	-	17	17	3	3	17	17	172	172	786	786
15	WANAREJA	1	1	-	-	16	16	6	6	16	16	189	189	673	673
16	DAYEULUHUR	1	1	-	-	14	14	4	4	14	14	118	118	385	385
17	SAMPANG	1	1	-	-	10	10	4	4	10	10	72	72	227	227
18	CIPARI	1	1	-	-	11	11	3	3	11	11	80	80	364	364
19	PATIMUAN	1	1	-	-	7	7	1	1	7	7	79	79	322	322
20	BANTARSARI	1	1	-	-	8	8	3	3	8	8	67	67	410	410
21	CILACAP SELATAN	1	1	-	-	5	5	7	7	10	10	73	73	447	447
22	CILACAP TENGAH	1	1	-	-	5	5	6	6	5	5	80	80	422	422
23	CILACAP UTARA	1	1	-	-	5	5	5	5	5	5	71	71	354	354
24	KAMPUNGLAUT	1	1	-	-	4	4	2	2	7	7	39	39	128	128
	Jumlah	24	24	0	0	284	284	93	93	292	292	2,341	2,341	10,484	10,484

ASPEK : PEMANTAUAN PELEMBAGAAN DAN JEJARING KB
 INDIKATOR : CAKUPAN LAPORAN KEADAAN UMUM
 BULAN : DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	Jumlah Poktan BKB		Jumlah Poktan BKR		Jumlah Poktan BKL		Jumlah Poktan UPPKS		Total	Jumlah PIK Remaja					
		yang ada	yang dilaporkan	yang ada	yang dilaporkan	yang ada	yang dilaporkan	yang ada	yang dilaporkan		Pik Remaja Tumbuh		Pik Remaja Tegak		Pik Remaja Tegar	
											yang ada	yang dilaporkan	yang ada	yang dilaporkan	yang ada	yang dilaporkan
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
1	KEDUNGREJA	14	14	11	11	11	11	15	15	5	4	4	1	1	-	-
2	KESUGIHAN	16	16	16	16	24	24	18	18	5	3	3	2	2	-	-
3	ADIPALA	19	19	3	3	24	24	14	14	5	4	4	1	1	-	-
4	BINANGUN	17	17	17	17	17	17	17	17	3	1	1	1	1	1	1
5	NUSAWUNGU	34	17	17	17	17	17	17	17	2	2	2	-	-	-	-
6	KROYA	17	17	18	18	21	21	30	30	5	3	3	1	1	1	1
7	M A O S	14	14	2	2	20	20	14	14	4	1	1	2	2	1	1
8	JERUKLEGI	15	15	14	14	18	18	20	20	5	3	3	2	2	-	-
9	KAWUNGANTEN	12	12	5	5	12	12	12	12	6	5	5	-	-	1	1
10	GANDRUNGMANGU	16	16	13	13	18	18	28	28	4	3	3	1	1	-	-
11	SIDAREJA	10	10	10	10	10	10	10	10	3	1	1	2	2	-	-
12	KARANGPUCUNG	14	14	9	9	14	14	14	14	2	2	2	-	-	-	-
13	CIMANGGU	16	16	8	8	14	14	9	9	2	1	1	1	1	-	-
14	MAJENANG	17	17	17	17	17	4	6	6	3	2	2	-	-	1	1
15	WANAREJA	16	16	13	13	13	13	16	16	3	1	1	1	1	1	1
16	DAYEHLUHUR	19	19	14	14	16	16	17	17	3	2	2	1	1	-	-
17	SAMPANG	15	15	12	12	22	22	17	17	5	1	1	1	1	3	3
18	CIPARI	19	22	14	14	11	19	12	12	4	2	2	1	1	1	1
19	PATIMUAN	7	7	7	7	7	7	4	4	3	3	3	-	-	0	-
20	BANTARSARI	12	12	9	9	11	11	10	10	4	3	3	-	-	1	1
21	CILACAP SELATAN	14	14	6	6	6	6	6	6	4	3	3	1	1	-	-
22	CILACAP TENGAH	10	10	5	5	28	28	13	13	2	1	1	1	1	-	-
23	CILACAP UTARA	9	9	7	7	25	25	7	7	6	4	4	2	2	-	-
24	KAMPUNGLAUT	7	7	3	3	4	4	3	3	3	3	3	-	-	-	-
	jumlah	359	345	250	250	380	375	329	329	91	58	58	22	22	11	11

ASPEK : PEMANTAUAN PELEMBAGAAN DAN JEJARING KB
 INDIKATOR : CAKUPAN LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL
 BULAN : DESEMBER 2018

	KECAMATAN	Jumlah Frekwensi Operasional MUPEN Kabupaten	Jumlah Frekwensi Rakor Program KB tingkat Kecamatan	Jumlah Frekwensi Rakor Program KB tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah Frekwensi penyuluhan oleh PLKB/PKB	Jumlah Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit	Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama yang aktif melakukan KIE KB	Jumlah Frekwensi TKBK Kecamatan ke Desa/Kelurahan	Jumlah Frekwensi TKBK Kabupaten ke Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	KEDUNGREJA	-	12	132	432	180	108	132	-
2	KESUGIHAN	-	12	192	1848	1404	132	192	-
3	ADIPALA	-	12	192	816	192	384	192	-
4	BINANGUN	-	12	204	432	228	252	204	-
5	NUSAWUNGU	-	12	204	912	576	252	204	-
6	KROYA	-	12	204	852	1140	216	204	-
7	M A O S	-	12	120	1020	120	108	120	-
8	JERUKLEGI	-	12	156	1536	444	156	156	-
9	KAWUNGANTEN	-	12	144	948	408	336	144	-
10	GANDRUNGMANGU	-	12	168	240	240	156	168	-
11	SIDAREJA	-	12	120	264	540	276	120	-
12	KARANGPUCUNG	-	12	168	528	168	132	168	-
13	CIMANGGU	-	12	180	384	984	156	180	-
14	MAJENANG	-	12	204	1020	504	444	204	-
15	WANAREJA	-	12	192	192	192	252	192	-
16	DAYEUHLUHUR	-	12	168	564	900	180	168	-
17	SAMPANG	-	12	120	1212	1188	108	120	-
18	CIPARI	-	12	132	444	516	132	132	-
19	PATIMUAN	-	12	84	252	168	84	84	-
20	BANTARSARI	-	12	96	384	384	192	96	-
21	CILACAP SELATAN	-	12	60	1476	456	96	60	-
22	CILACAP TENGAH	-	12	60	1764	576	144	60	-
23	CILACAP UTARA	-	12	60	1128	348	120	60	-
24	KAMPUNGLAUT	-	12	48	288	288	48	48	-
	Jumlah	-	288	3,408	18,936	12,144	4,464	3,408	-

ASPEK : PEMANTAUAN PELEMBAGAAN DAN JEJARING KB
 INDIKATOR : CAKUPAN LAPORAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
 BULAN : **DESEMBER 2018**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI SASARAN KELOMPOK KEGIATAN			JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN			JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN HADIR DALAM PERTEMUAN/PENYULUHAN			JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN BERSTATUS PUS		
		BKB	BKR	BKL	BKB	BKR	BKL	BKB	BKR	BKL	BKB	BKR	BKL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	KEDUNGREJA	1,483	456	836	836	328	570	763	197	383	725	208	352
2	KESUGIHAN	3,600	13,941	5,362	816	614	461	571	219	361	816	614	349
3	ADIPALA	4,675	2,589	1,741	1,106	55	519	814	50	360	1,082	42	25
4	BINANGUN	3,988	1,288	998	2,149	598	578	739	361	462	1,535	435	362
5	NUSAWUNGU	4,322	1,386	1,156	1,055	655	702	482	391	573	847	331	381
6	KROYA	1,164	1,183	1,280	1,043	946	1,075	813	738	839	594	539	-
7	M A O S	3,052	7,260	5,139	1,089	155	760	1,080	115	755	1,015	115	124
8	JERUKLEGI	3,925	5,877	1,042	581	413	1,042	562	249	252	561	368	386
9	KAWUNGANTEN	5,440	5,860	5,648	674	308	354	536	144	259	648	198	219
10	GANDRUNGMANGU	5,532	10,204	12,044	562	390	542	541	369	416	526	335	523
11	SIDAREJA	3,369	4,926	3,465	737	617	545	690	495	450	707	603	217
12	KARANGPUCUNG	4,347	4,022	6,092	833	361	642	417	141	311	458	161	256
13	CIMANGGU	2,566	2,866	2,652	876	686	634	687	654	463	684	613	294
14	MAJENANG	7,953	7,824	7,645	562	412	104	555	319	98	399	312	35
15	WANAREJA	6,925	2,649	1,578	469	342	511	460	316	482	464	311	225
16	DAYEUHLUHUR	2,706	3,267	1,862	858	463	728	746	334	478	839	399	98
17	SAMPANG	2,632	1,427	2,111	1,276	777	1,166	1,151	655	109	1,157	455	341
18	CIPARI	4,170	7,010	6,037	1,162	578	1,143	866	307	808	904	409	231
19	PATIMUAN	350	111	341	327	96	131	300	94	97	250	75	61
20	BANTARSARI	5,453	7,538	4,110	400	298	382	351	217	327	400	271	45
21	CILACAP SELATAN	4,967	7,085	4,717	857	193	590	561	177	468	458	128	198
22	CILACAP TENGAH	966	359	2,333	718	178	1,708	467	122	1,137	547	112	483
23	CILACAP UTARA	5,119	8,562	5,460	736	345	1,261	570	177	815	684	284	189
24	KAMPUNGLAUT	291	98	124	291	98	124	158	47	72	158	47	32
	Jumlah	88,995	107,788	83,773	20,013	9,906	16,272	14,880	6,888	10,775	16,458	7,365	5,426

ASPEK : PEMANTAUAN PELEMBAGAAN DAN JEJARING KB
 INDIKATOR : CAKUPAN LAPORAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
 BULAN : **DESEMBER 2018**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK YANG MENJADI PESERTA KB			JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN BERSTATUS PUS Pra S & KS I			JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK YANG MENJADI PESERTA KB Pra S & KS I			JUMLAH PERTEMUAN /PENYULUHAN KELOMPOK KEGIATAN			JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN BKB YANG MENGGUNAKAN KKA
		BKB	BKR	BKL	BKB	BKR	BKL	BKB	BKR	BKL	BKB	BKR	BKL	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	KEDUNGREJA	684	145	294	294	136	118	162	82	57	14	11	13	752
2	KESUGIHAN	521	495	286	641	210	299	252	165	237	16	16	16	800
3	ADIPALA	874	31	-	284	7	-	211	7	-	19	3	24	1000
4	BINANGUN	896	229	188	848	322	262	121	120	112	17	17	17	366
5	NUSAWUNGU	757	285	184	375	322	269	269	118	107	17	17	17	427
6	KROYA	416	377	-	357	324	-	243	220	-	17	18	9	461
7	M A O S	819	101	78	325	45	67	269	33	34	14	4	20	1089
8	JERUKLEGI	404	301	213	328	119	142	249	93	112	12	12	12	562
9	KAWUNGANTEN	528	176	202	416	86	144	344	84	114	12	7	12	673
10	GANDRUNGMANGU	384	255	321	330	227	349	231	165	186	14	14	14	445
11	SIDAREJA	631	412	189	464	383	109	264	230	68	10	10	10	564
12	KARANGPUCUNG	355	161	192	458	113	224	325	94	160	14	9	14	190
13	CIMANGGU	502	461	215	284	260	138	221	111	101	16	8	14	0
14	MAJENANG	259	203	23	208	162	18	135	106	12	17	17	4	79
15	WANAREJA	443	298	202	112	96	65	110	90	36	16	13	13	216
16	DAYEUHLUHUR	821	345	94	198	203	27	187	141	24	19	14	16	213
17	SAMPANG	972	319	258	510	265	280	355	203	178	21	13	22	1059
18	CIPARI	703	360	158	525	236	216	239	140	108	22	14	19	782
19	PATIMUAN	241	71	59	183	21	39	179	18	35	7	7	7	327
20	BANTARSARI	325	216	35	142	95	16	122	81	13	12	9	11	400
21	CILACAP SELATAN	302	87	124	221	85	97	134	36	79	11	6	6	451
22	CILACAP TENGAH	430	84	154	246	79	162	199	57	105	10	5	28	114
23	CILACAP UTARA	521	185	106	80	32	42	55	16	23	9	6	22	548
24	KAMPUNGLAUT	158	47	32	86	27	22	86	27	22	7	3	4	195
	Jumlah	12,946	5,644	3,607	7,915	3,855	3,105	4,962	2,437	1,923	343	253	344	11,713

ASPEK : PEMANTAUAN PELEMBAGAAN DAN JEJARING KB
 INDIKATOR : CAKUPAN LAPORAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 BULAN : DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS		Status KB Anggota Kelompok UPPKS			
		a. Semua Anggota Kelompok	b. Keluarga Pra KS dan KS I	Anggota dari Seluruh Tahapan KS		Anggota dari Tahapan Pra S dan KS I	
				Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS ber KB	Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS	Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS ber KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEDUNGREJA	264	192	184	156	149	126
2	KESUGIHAN	706	657	621	517	581	437
3	ADIPALA	169	50	169	116	20	18
4	BINANGUN	1,748	736	1,488	1,016	595	411
5	NUSAWUNGU	1,748	722	1,473	1,012	588	426
6	KROYA	804	481	513	183	266	182
7	M A O S	145	90	109	89	71	58
8	JERUKLEGI	328	278	298	259	102	78
9	KAWUNGANTEN	106	62	102	98	61	58
10	GANDRUNGMANGU	344	289	273	233	226	194
11	SIDAREJA	565	278	487	387	205	189
12	KARANGPUCUNG	1,389	1,037	1,127	301	386	301
13	CIMANGGU	143	23	119	97	64	48
14	MAJENANG	63	32	35	28	18	14
15	WANAREJA	465	200	450	369	200	174
16	DAYEHLUHUR	330	103	291	253	99	93
17	SAMPANG	391	297	276	229	194	169
18	CIPARI	410	186	263	207	124	92
19	PATIMUAN	68	42	42	38	42	38
20	BANTARSARI	288	163	202	146	114	82
21	CILACAP SELATAN	57	48	41	35	36	31
22	CILACAP TENGAH	114	72	94	69	51	38
23	CILACAP UTARA	208	41	164	111	39	33
24	KAMPUNGLAUT	34	22	29	29	22	22
	Jumlah	10,887	6,101	8,850	5,978	4,253	3,312

ASPEK : PEMANTAUAN PELEMBAGAAN DAN JEJARING KB
 INDIKATOR : CAKUPAN LAPORAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 BULAN : DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dan jumlahnya pada bulan ini												
			APBN		APBD		Krista		KUR		PNPM		Lainnya		
			Jumlah Sumber dana	Jumlah Modal (Rp)	Jumlah Sumber dana	Jumlah Modal (Rp)	Jumlah Sumber dana	Jumlah Modal (Rp)	Jumlah Sumber dana	Jumlah Modal (Rp)	Jumlah Sumber dana	Jumlah Modal (Rp)	Jumlah Sumber dana	Jumlah Modal (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	KEDUNGREJA	15	-	Rp -	2	Rp 4,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	13	Rp 161,270,000	-	Rp -
2	KESUGIHAN	18	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
3	ADIPALA	14	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	14	Rp 422,000,000	-	Rp -
4	BINANGUN	17	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	17	Rp 148,000,000	-	Rp -
5	NUSAWUNGU	17	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
6	KROYA	30	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	27	Rp 60,861,000,000	-	Rp -
7	M A O S	14	3	Rp 6,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
8	JERUKLEGI	20	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
9	KAWUNGANTEN	12	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
10	GANDRUNGMANGU	28	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
11	SIDAREJA	10	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
12	KARANGPUCUNG	14	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
13	CIMANGGU	9	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
14	MAJENANG	6	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
15	WANAREJA	16	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
16	DAYEHLUHUR	17	-	Rp -	2	Rp 4,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	5	Rp 73,000,000	10	Rp 1,897,500,000
17	SAMPANG	17	2	Rp 10,000,000	2	Rp 4,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	18	Rp 2,481,000,000	-	Rp -
18	CIPARI	12	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
19	PATIMUAN	4	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
20	BANTARSARI	10	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
21	CILACAP SELATAN	6	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
22	CILACAP TENGAH	13	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
23	CILACAP UTARA	7	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
24	KAMPUNGLAUT	3	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	3	Rp 12,000,000	-	Rp -
	Jumlah	329	5	Rp 16,000,000	6	Rp 12,000,000	0	Rp -	0	Rp -	97	Rp 64,158,270,000	10	Rp 1,897,500,000	

ASPEK : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB - KR
 INDIKATOR : HASIL PEROLEHAN PESERTA KB BARU DIKOMPARASIKAN DENGAN PPM PB
 BULAN : SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018

No	Kecamatan	PENCAPAIAN PERSERTA KB BARU DIKOMPARASIKAN DENGAN PPM PB TAHUN 2018														
		IUD			MOW			IMP			STK			PIL		
		PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KEDUNGREJA	177	103	58.19	19	6	31.58	345	358	103.77	875	375	42.86	513	214	41.72
2	KESUGIHAN	406	82	20.20	43	10	23.26	793	472	59.52	2007	588	29.30	1,175	546	46.47
3	ADIPALA	308	81	26.30	33	-	-	603	284	47.10	1528	1,302	85.21	895	610	68.16
4	BINANGUN	189	37	19.58	20	2	10.00	371	174	46.90	940	336	35.74	550	251	45.64
5	NUSAWUNGU	199	36	18.09	21	2	9.52	391	220	56.27	990	774	78.18	580	111	19.14
6	KROYA	283	136	48.06	30	16	53.33	555	445	80.18	1407	1,035	73.56	824	540	65.53
7	M A O S	109	56	51.38	11	9	81.82	214	242	113.08	541	429	79.30	317	163	51.42
8	JERUKLEGI	185	391	211.35	20	7	35.00	362	565	156.08	917	702	76.55	537	157	29.24
9	KAWUNGANTEN	138	167	121.01	15	28	186.67	270	386	142.96	684	881	128.80	401	192	47.88
10	GANDRUNGMANGU	277	130	46.93	29	-	-	542	303	55.90	1374	713	51.89	805	501	62.24
11	SIDAREJA	179	255	142.46	19	5	26.32	350	369	105.43	887	638	71.93	520	409	78.65
12	KARANGPUCUNG	147	98	66.67	16	6	37.50	288	501	173.96	731	497	67.99	428	4	0.93
13	CIMANGGU	266	134	50.38	28	2	7.14	520	531	102.12	1318	1,149	87.18	772	402	52.07
14	MAJENANG	310	797	257.10	33	66	200.00	604	373	61.75	1531	1,758	114.83	897	149	16.61
15	WANAREJA	342	79	23.10	37	4	10.81	668	482	72.16	1691	1,291	76.35	991	-	-
16	DAYEULUHUR	142	55	38.73	15	7	46.67	279	194	69.53	706	574	81.30	414	495	119.57
17	SAMPANG	117	96	82.05	12	7	58.33	228	317	139.04	578	768	132.87	339	213	62.83
18	CIPARI	198	114	57.58	21	10	47.62	387	494	127.65	981	652	66.46	573	59	10.30
19	PATIMUAN	111	45	40.54	12	-	-	217	215	99.08	549	328	59.74	322	239	74.22
20	BANTARSARI	139	105	75.54	15	1	6.67	273	207	75.82	691	315	45.59	404	13	3.22
21	CILACAP SELATAN	220	116	52.73	23	-	-	429	219	51.05	1088	867	79.69	637	293	46.00
22	CILACAP TENGAH	261	604	231.42	28	199	710.71	509	677	133.01	1291	721	55.85	756	179	23.68
23	CILACAP UTARA	333	354	106.31	35	32	91.43	649	268	41.29	1644	655	39.84	962	398	41.37
24	KAMPUNGLAUT	51	11	21.57	5	2	40.00	99	199	-	251	72	28.69	146	23	15.75
J U M L A H		5,087	4,082	80.24	540	421	77.96	9,946	8,495	85.41	25,200	17,420	69.13	14,758	6,161	41.75

ASPEK : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB - KR
 INDIKATOR : HASIL PEROLEHAN PESERTA KB BARU DIKOMPARASIKAN DENGAN PPM PB
 BULAN : SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018

No	Kecamatan	PENCAPAIAN PERSERTA KB BARU DIKOMPARASIKAN DENGAN PPM PB TAHUN 2018														
		MOP			KDM			JUMLAH			PARTISIPASI PRIA			PB MKJP		
		PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	KEDUNGREJA	1	1	100.00	80	54	67.50	2,010	1,111	55.27	81	55	67.90	542	468	86.35
2	KESUGIHAN	2	-	-	185	47	25.41	4,611	1,745	37.84	187	47	25.13	1,244	564	45.34
3	ADIPALA	1	-	-	140	158	112.86	3,508	2,435	69.41	141	158	112.06	945	365	38.62
4	BINANGUN	1	-	-	86	-	-	2,157	800	37.09	87	-	-	581	213	36.66
5	NUSAWUNGU	1	-	-	91	8	8.79	2,273	1,151	50.64	92	8	8.70	612	258	42.16
6	KROYA	1	-	-	129	80	62.02	3,229	2,252	69.74	130	80	61.54	869	597	68.70
7	M A O S	1	1	100.00	50	4	8.00	1,243	904	72.73	51	5	9.80	335	308	91.94
8	JERUKLEGI	1	-	-	84	4	4.76	2,106	1,826	86.70	85	4	4.71	568	963	169.54
9	KAWUNGANTEN	1	-	-	63	57	90.48	1,572	1,711	108.84	64	57	89.06	424	581	137.03
10	GANDRUNGMANGU	1	-	-	126	39	30.95	3,154	1,686	53.46	127	39	30.71	849	433	51.00
11	SIDAREJA	1	-	-	81	72	88.89	2,037	1,748	85.81	82	72	87.80	549	629	114.57
12	KARANGPUCUNG	1	-	-	67	-	-	1,678	1,106	65.91	68	-	-	452	605	133.85
13	CIMANGGU	1	-	-	121	6	4.96	3,026	2,224	73.50	122	6	4.92	815	667	81.84
14	MAJENANG	1	-	-	141	14	9.93	3,517	3,157	89.76	142	14	9.86	948	1,236	130.38
15	WANAREJA	1	-	-	156	20	12.82	3,886	1,876	48.28	157	20	12.74	1,048	565	53.91
16	DAYEHLUHUR	1	-	-	65	69	106.15	1,622	1,394	85.94	66	69	104.55	437	256	58.58
17	SAMPANG	1	-	-	53	33	62.26	1,328	1,434	107.98	54	33	61.11	358	420	117.32
18	CIPARI	1	2	200.00	90	16	17.78	2,251	1,347	59.84	91	18	19.78	607	620	102.14
19	PATIMUAN	1	-	-	50	1	2.00	1,262	828	65.61	51	1	1.96	341	260	76.25
20	BANTARSARI	1	2	200.00	63	-	-	1,586	643	40.54	64	2	3.13	428	315	73.60
21	CILACAP SELATAN	1	-	-	100	31	31.00	2,498	1,526	61.09	101	31	30.69	673	335	49.78
22	CILACAP TENGAH	1	6	600.00	119	60	50.42	2,965	2,446	82.50	120	66	55.00	799	1,486	185.98
23	CILACAP UTARA	1	-	-	151	124	82.12	3,775	1,831	48.50	152	124	81.58	1,018	654	64.24
24	KAMPUNGLAUT	1	-	-	23	3	13.04	576	310	53.82	24	3	12.50	156	212	135.90
J U M L A H		25	12	48.00	2,314	900	38.89	57,870	37,491	64.78	2,339	912	38.99	15,598	13,010	83.41

ASPEK : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB - KR
 INDIKATOR : PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DIKOMPARASIKAN DENGAN PPM PA
 BULAN : SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018

No	Kecamatan	PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DIKOMPARASIKAN DENGAN PPM PA TAHUN 2018														
		IUD			MOW			MOP			KDM			IMP		
		PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KEDUNGREJA	870	1,320	151.72	267	312	116.85	24	28	116.67	434	366	84.33	963	2,204	228.87
2	KESUGIHAN	1,912	1,392	72.80	589	430	73.01	51	16	31.37	956	553	57.85	2,116	2,543	120.18
3	ADIPALA	1,196	827	69.15	367	602	164.03	32	51	159.38	598	352	58.86	1,323	1,721	130.08
4	BINANGUN	925	1,132	122.38	284	416	146.48	25	121	484.00	462	368	79.65	1,025	2,049	199.90
5	NUSAWUNGU	1,099	1,119	101.82	337	411	121.96	30	118	393.33	549	351	63.93	1,216	2,255	185.44
6	KROYA	1,669	1,776	106.41	516	467	90.50	45	36	80.00	838	884	105.49	1,857	2,328	125.36
7	M A O S	474	854	180.17	146	302	206.85	13	15	115.38	237	132	55.70	525	1,350	257.14
8	JERUKLEGI	665	2,105	316.54	204	378	185.29	18	49	272.22	332	320	96.39	737	1,605	217.77
9	KAWUNGANTEN	837	941	112.43	257	373	145.14	23	23	100.00	418	139	33.25	927	1,721	185.65
10	GANDRUNGMANGU	888	1,924	216.67	273	262	95.97	24	52	216.67	444	463	104.28	984	2,608	265.04
11	SIDAREJA	786	1,234	157.00	241	129	53.53	21	28	133.33	392	239	60.97	869	1,158	133.26
12	KARANGPUCUNG	775	738	95.23	238	150	63.03	21	23	109.52	387	89	23.00	858	1,737	202.45
13	CIMANGGU	956	2,778	290.59	294	232	78.91	26	182	700.00	478	428	89.54	1,059	3,100	292.73
14	MAJENANG	1,541	3,558	230.89	473	215	45.45	42	37	88.10	770	280	36.36	1,705	3,253	190.79
15	WANAREJA	1,263	1,489	117.89	388	248	63.92	34	236	694.12	631	328	51.98	1,397	3,004	215.03
16	DAYEULUHUR	382	434	113.61	118	98	83.05	10	45	450.00	191	249	130.37	423	783	185.11
17	SAMPANG	538	738	137.17	166	220	132.53	15	9	60.00	269	302	112.27	596	1,696	284.56
18	CIPARI	595	614	103.19	183	121	66.12	16	30	187.50	297	89	29.97	659	1,378	209.10
19	PATIMUAN	443	499	112.64	136	72	52.94	12	21	175.00	221	47	21.27	490	1,027	209.59
20	BANTARSARI	611	1,297	212.27	188	292	155.32	17	99	582.35	306	82	26.80	677	1,451	214.33
21	CILACAP SELATAN	1,041	1,613	154.95	320	603	188.44	28	18	64.29	521	969	185.99	1,152	688	59.72
22	CILACAP TENGAH	1,260	1,925	152.78	387	586	151.42	34	12	35.29	629	801	127.34	1,394	751	53.87
23	CILACAP UTARA	1,144	1,489	130.16	351	280	79.77	31	7	22.58	571	455	79.68	1,265	770	60.87
24	KAMPUNGLAUT	148	114	77.03	45	38	84.44	4	-	-	74	33	44.59	163	388	238.04
	J U M L A H	22,018	31,910	144.93	6,768	7,237	106.93	596	1,256	210.74	11,005	8,319	75.59	24,380	41,568	170.50

ASPEK : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB - KR
 INDIKATOR : PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DIKOMPARASIKAN DENGAN PPM PA
 BULAN : SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018

No	Kecamatan	PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DIKOMPARASIKAN DENGAN PPM PA TAHUN 2018														
		STK			PIL			JUMLAH			PARTISIPASI PRIA			PA MKJP		
		PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%	PPM	REAL	%
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	KEDUNGREJA	4,215	2,792	66.24	1,941	2,626	135.29	8,714	9,648	110.72	458	394	86.03	2,124	3,864	181.92
2	KESUGIHAN	9,261	7,738	83.55	4,265	3,042	71.32	19,150	15,714	82.06	1,007	569	56.50	4,668	4,381	93.85
3	ADIPALA	5,792	6,756	116.64	2,667	2,804	105.14	11,975	13,113	109.50	630	403	63.97	2,918	3,201	109.70
4	BINANGUN	4,483	3,476	77.54	2,064	2,528	122.48	9,268	10,090	108.87	487	489	100.41	2,259	3,718	164.59
5	NUSAWUNGU	5,319	4,057	76.27	2,449	2,674	109.19	10,999	10,985	99.87	579	469	81.00	2,682	3,903	145.53
6	KROYA	8,125	9,106	112.07	3,743	3,211	85.79	16,793	17,808	106.04	883	920	104.19	4,087	4,607	112.72
7	M A O S	2,296	2,075	90.37	1,058	889	84.03	4,749	5,617	118.28	250	147	58.80	1,158	2,521	217.70
8	JERUKLEGI	3,222	3,023	93.82	1,484	1,243	83.76	6,662	8,723	130.94	350	369	105.43	1,624	4,137	254.74
9	KAWUNGANTEN	4,056	6,334	156.16	1,868	1,548	82.87	8,386	11,079	132.11	441	162	36.73	2,044	3,058	149.61
10	GANDRUNGMANGU	4,302	6,156	143.10	1,981	3,284	165.77	8,896	14,749	165.79	468	515	110.04	2,169	4,846	223.42
11	SIDAREJA	3,804	2,514	66.09	1,752	1,537	87.73	7,865	6,839	86.95	413	267	64.65	1,917	2,549	132.97
12	KARANGPUCUNG	3,754	6,126	163.19	1,728	1,036	59.95	7,761	9,899	127.55	408	112	27.45	1,892	2,648	139.96
13	CIMANGGU	4,633	5,360	115.69	2,133	4,564	213.97	9,579	16,644	173.76	504	610	121.03	2,335	6,292	269.46
14	MAJENANG	7,461	8,865	118.82	3,435	3,957	115.20	15,427	20,165	130.71	812	317	39.04	3,761	7,063	187.80
15	WANAREJA	6,111	6,610	108.17	2,814	3,202	113.79	12,638	15,117	119.62	665	564	84.81	3,082	4,977	161.49
16	DAYEULUHUR	1,853	4,323	233.30	853	2,705	317.12	3,830	8,637	225.51	201	294	146.27	933	1,360	145.77
17	SAMPANG	2,609	1,668	63.93	1,201	1,294	107.74	5,394	5,927	109.88	284	311	109.51	1,315	2,663	202.51
18	CIPARI	2,882	4,528	157.11	1,327	1,000	75.36	5,959	7,760	130.22	313	119	38.02	1,453	2,143	147.49
19	PATIMUAN	2,144	3,460	161.38	988	2,089	211.44	4,434	7,215	162.72	233	68	29.18	1,081	1,619	149.77
20	BANTARSARI	2,961	4,741	160.11	1,364	1,369	100.37	6,124	9,331	152.37	323	181	56.04	1,493	3,139	210.25
21	CILACAP SELATAN	5,041	3,629	71.99	2,321	2,148	92.55	10,424	9,668	92.75	549	987	179.78	2,541	2,922	114.99
22	CILACAP TENGAH	6,099	3,905	64.03	2,810	2,912	103.63	12,613	10,892	86.36	663	813	122.62	3,075	3,274	106.47
23	CILACAP UTARA	5,536	4,748	85.77	2,549	2,300	90.23	11,447	10,049	87.79	602	462	76.74	2,791	2,546	91.22
24	KAMPUNGLAUT	715	1,002	140.14	329	373	113.37	1,478	1,948	131.80	78	33	42.31	360	540	150.00
J U M L A H		106,674	112,992	105.92	49,124	54,335	110.61	220,565	257,617	116.80	11,601	9,575	82.54	53,762	81,971	152.47

ASPEK : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB - KR
 INDIKATOR : PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF BERDASARKAN JALUR PELAYANAN
 BULAN : DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	PEMERINTAH							Jumlah	SWASTA							Jumlah
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KEDUNGREJA	1,188	240	15	284	2,147	1,286	2,272	7,432	132	72	13	82	57	1,506	354	2,216
2	KESUGIHAN	1,172	358	16	456	2,543	2,501	2,503	9,549	220	72	0	97	0	5,237	539	6,165
3	ADIPALA	665	499	51	271	1,689	2,266	1,934	7,375	162	103	0	81	32	4,490	870	5,738
4	BINANGUN	996	302	110	266	1,694	1,343	1,309	6,020	136	114	11	102	355	2,133	1,219	4,070
5	NUSAWUNGU	998	284	107	256	1,936	1,698	1,425	6,704	121	127	11	95	319	2,359	1,249	4,281
6	KROYA	1,776	467	36	884	2,328	4,986	3,103	13,580	0	0	0	0	0	4,120	108	4,228
7	M A O S	797	276	15	127	1,350	741	886	4,192	57	26	0	5	0	1,334	3	1,425
8	JERUKLEGI	1,774	252	48	257	1,541	1,012	1,206	6,090	331	126	1	63	64	2,011	37	2,633
9	KAWUNGANTEN	827	318	22	107	1,721	2,003	1,145	6,143	114	55	1	32	0	4,331	403	4,936
10	GANDRUNGMANGU	1,772	245	52	431	2,592	4,077	2,789	11,958	152	17	0	32	16	2,079	495	2,791
11	SIDAREJA	987	72	18	103	1,004	865	652	3,701	247	57	10	136	154	1,649	885	3,138
12	KARANGPUCUNG	707	84	23	89	1,717	1,177	907	4,704	31	66	0	0	20	4,949	129	5,195
13	CIMANGGU	2,423	165	155	304	2,838	2,806	2,474	11,165	355	67	27	124	262	2,554	2,090	5,479
14	MAJENANG	3,228	173	37	253	3,195	3,173	2,058	12,117	330	42	0	27	58	5,692	1,899	8,048
15	WANAREJA	1,386	125	231	268	2,734	5,031	1,902	11,677	103	123	5	60	270	1,579	1,300	3,440
16	DAYEULUHUR	421	79	45	224	742	2,351	1,984	5,846	27	19	0	25	41	1,972	721	2,805
17	SAMPANG	633	190	9	215	1,454	611	861	3,973	105	30	0	87	242	1,057	433	1,954
18	CIPARI	580	103	29	53	1,251	1,263	551	3,830	34	18	1	36	127	3,265	449	3,930
19	PATIMUAN	455	51	18	47	861	1,602	1,194	4,228	44	21	3	0	166	1,858	895	2,987
20	BANTARSARI	1,148	259	99	78	1,414	1,316	1,118	5,432	149	33	0	4	37	3,425	251	3,899
21	CILACAP SELATAN	866	338	13	311	557	822	1,170	4,077	747	265	5	658	131	2,807	978	5,591
22	CILACAP TENGAH	1,007	285	12	491	659	2,101	1,793	6,348	918	301	0	310	92	1,804	1,119	4,544
23	CILACAP UTARA	758	180	7	173	713	885	723	3,439	731	100	0	282	57	3,863	1,577	6,610
24	KAMPUNGLAUT	109	32	0	33	388	756	345	1,663	5	6	0	0	0	246	28	285
Jumlah		26,673	5,377	1,168	5,981	39,068	46,672	36,304	161,243	5,251	1,860	88	2,338	2,500	66,320	18,031	96,388

ASPEK : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB - KR
 INDIKATOR : PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF
 BULAN : DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	PUS	SELURUH TAHAPAN KS							Jumlah	%	PART. PRIA	%	PA MKJP	%	PPM PA 2018	%
			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil								
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
1	KEDUNGREJA	14,176	1,320	312	28	366	2,204	2,792	2,626	9,648	68.06	394	4.08	3,864	40.05	8,714	110.72
2	KESUGIHAN	22,287	1,392	430	16	553	2,543	7,738	3,042	15,714	70.51	569	3.62	4,381	27.88	19,150	82.06
3	ADIPALA	18,203	827	602	51	352	1,721	6,756	2,804	13,113	72.04	403	3.07	3,201	24.41	11,975	109.50
4	BINANGUN	13,971	1,132	416	121	368	2,049	3,476	2,528	10,090	72.22	489	4.85	3,718	36.85	9,268	108.87
5	NUSAWUNGU	15,754	1,119	411	118	351	2,255	4,057	2,674	10,985	69.73	469	4.27	3,903	35.53	10,999	99.87
6	KROYA	24,736	1,776	467	36	884	2,328	9,106	3,211	17,808	71.99	920	5.17	4,607	25.87	16,793	106.04
7	M A O S	7,916	854	302	15	132	1,350	2,075	889	5,617	70.96	147	2.62	2,521	44.88	4,749	118.28
8	JERUKLEGI	12,149	2,105	378	49	320	1,605	3,023	1,243	8,723	71.80	369	4.23	4,137	47.43	6,662	130.94
9	KAWUNGANTEN	15,384	941	373	23	139	1,721	6,334	1,548	11,079	72.02	162	1.46	3,058	27.60	8,386	132.11
10	GANDRUNGMANGU	20,810	1,924	262	52	463	2,608	6,156	3,284	14,749	70.87	515	3.49	4,846	32.86	8,896	165.79
11	SIDAREJA	10,341	1,234	129	28	239	1,158	2,514	1,537	6,839	66.13	267	3.90	2,549	37.27	7,865	86.95
12	KARANGPUCUNG	14,529	738	150	23	89	1,737	6,126	1,036	9,899	68.13	112	1.13	2,648	26.75	7,761	127.55
13	CIMANGGU	23,664	2,778	232	182	428	3,100	5,360	4,564	16,644	70.33	610	3.66	6,292	37.80	9,579	173.76
14	MAJENANG	31,017	3,558	215	37	280	3,253	8,865	3,957	20,165	65.01	317	1.57	7,063	35.03	15,427	130.71
15	WANAREJA	23,332	1,489	248	236	328	3,004	6,610	3,202	15,117	64.79	564	3.73	4,977	32.92	12,638	119.62
16	DAYEULUHUR	12,110	434	98	45	249	783	4,323	2,705	8,637	71.32	294	3.40	1,360	15.75	3,830	225.51
17	SAMPANG	8,806	738	220	9	302	1,696	1,668	1,294	5,927	67.31	311	5.25	2,663	44.93	5,394	109.88
18	CIPARI	11,928	614	121	30	89	1,378	4,528	1,000	7,760	65.06	119	1.53	2,143	27.62	5,959	130.22
19	PATIMUAN	10,300	499	72	21	47	1,027	3,460	2,089	7,215	70.05	68	0.94	1,619	22.44	4,434	162.72
20	BANTARSARI	13,742	1,297	292	99	82	1,451	4,741	1,369	9,331	67.90	181	1.94	3,139	33.64	6,124	152.37
21	CILACAP SELATAN	13,334	1,613	603	18	969	688	3,629	2,148	9,668	72.51	987	10.21	2,922	30.22	10,424	92.75
22	CILACAP TENGAH	15,250	1,925	586	12	801	751	3,905	2,912	10,892	71.42	813	7.46	3,274	30.06	12,613	86.36
23	CILACAP UTARA	15,590	1,489	280	7	455	770	4,748	2,300	10,049	64.46	462	4.60	2,546	25.34	11,447	87.79
24	KAMPUNGLAUT	2,787	114	38	0	33	388	1,002	373	1,948	69.90	33	1.69	540	27.72	1,478	131.80
Jumlah		372,116	31,910	7,237	1,256	8,319	41,568	112,992	54,335	257,617	69.23	9,575	3.72	81,971	31.82	220,565	116.80

ASPEK : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB - KR
 INDIKATOR : PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KS I
 BULAN : DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	PUS	TAHAPAN PRA S & KS I							Jumlah	%	PART. PRIA	%	PA MKJP	%	PPM PA 2018	%
			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil								
(1)	(2)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)
1	KEDUNGREJA	10,127	882	205	15	303	1,628	2,063	2,336	7,432	73.39	318	4.28	2,730	36.73	8,714	85.29
2	KESUGIHAN	9,846	502	282	4	168	1,026	2,451	2,302	6,735	68.40	172	2.55	1,814	26.93	19,150	35.17
3	ADIPALA	6,955	354	239	12	100	711	2,476	1,116	5,008	72.01	112	2.24	1,316	26.28	11,975	41.82
4	BINANGUN	7,542	395	104	54	179	735	2,099	2,083	5,649	74.90	233	4.12	1,288	22.80	9,268	60.95
5	NUSAWUNGU	8,920	393	102	54	174	743	2,190	2,199	5,855	65.64	228	3.89	1,292	22.07	10,999	53.23
6	KROYA	4,506	321	99	7	177	348	1,996	752	3,700	82.11	184	4.97	775	20.95	16,793	22.03
7	M A O S	2,866	208	95	8	34	399	831	410	1,985	69.26	42	2.12	710	35.77	4,749	41.80
8	JERUKLEGI	6,428	734	362	21	154	489	2,271	1,058	5,089	79.17	175	3.44	1,606	31.56	6,662	76.39
9	KAWUNGANTEN	8,438	197	164	14	54	269	3,118	1,356	5,172	61.29	68	1.31	644	12.45	8,386	61.67
10	GANDRUNGMANGU	12,484	1,154	157	31	277	1,565	3,694	1,970	8,848	70.87	308	3.48	2,907	32.85	8,896	99.46
11	SIDAREJA	4,569	987	72	18	103	1,004	85	652	2,921	63.93	121	4.14	2,081	71.24	7,865	37.14
12	KARANGPUCUNG	6,646	332	84	16	55	710	2,756	569	4,522	68.04	71	1.57	1,142	25.25	7,761	58.27
13	CIMANGGU	10,869	1,509	101	37	168	1,938	1,942	2,432	8,127	74.77	205	2.52	3,585	44.11	9,579	84.84
14	MAJENANG	12,809	1,679	88	21	131	1,662	1,652	1,928	7,161	55.91	152	2.12	3,450	48.18	15,427	46.42
15	WANAREJA	5,635	402	96	92	166	711	675	675	2,817	49.99	258	9.16	1,301	46.18	12,638	22.29
16	DAYEHLUHUR	3,861	153	21	15	75	246	1,284	989	2,783	72.08	90	3.23	435	15.63	3,830	72.66
17	SAMPANG	2,742	146	55	0	84	353	881	538	2,057	75.02	84	4.08	554	26.93	5,394	38.13
18	CIPARI	5,722	312	64	16	38	754	2,128	493	3,805	66.50	54	1.42	1,146	30.12	5,959	63.85
19	PATIMUAN	4,965	160	16	7	23	464	1,596	1,087	3,353	67.53	30	0.89	647	19.30	4,434	75.62
20	BANTARSARI	8,514	804	181	61	50	899	2,939	848	5,782	67.91	111	1.92	1,945	33.64	6,124	94.42
21	CILACAP SELATAN	5,915	595	324	12	276	290	1,219	1,011	3,727	63.01	288	7.73	1,221	32.76	10,424	35.75
22	CILACAP TENGAH	3,727	214	130	8	225	223	800	1,171	2,771	74.35	233	8.41	575	20.75	12,613	21.97
23	CILACAP UTARA	3,235	260	54	0	56	226	697	651	1,944	60.09	56	2.88	540	27.78	11,447	16.98
24	KAMPUNGLAUT	1,352	61	21	0	15	198	449	202	946	69.97	15	1.59	280	29.60	1,478	64.01
Jumlah		158,673	12,754	3,116	523	3,085	17,591	42,292	28,828	108,189	68.18	3,608	3.33	33,984	31.41	220,565	49.05

ASPEK : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB - KR
 INDIKATOR : PUS BUKAN PESERTA KB HAMIL, INGIN ANAK SEGERA, INGIN ANAK DITUNDA DAN TIDAK INGIN ANAK LAGI
 BULAN : DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	SELURUH TAHAPAN KS									JUMLAH PUS	%	UNMET NEED	%
		HAMIL	%	I A S	%	I A T	%	TIAL	%	JUMLAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	KEDUNGREJA	562	3.96	2,401	53.03	1,035	22.86	530	11.70	4,528	14,176	31.94	1,565	11.04
2	KESUGIHAN	984	4.42	1,935	29.44	1,879	28.59	1,775	27.00	6,573	22,287	29.49	3,654	16.40
3	ADIPALA	632	3.47	1,696	33.32	1,397	27.45	1,365	26.82	5,090	18,203	27.96	2,762	15.17
4	BINANGUN	877	6.28	1,868	48.13	737	18.99	399	10.28	3,881	13,971	27.78	1,136	8.13
5	NUSAWUNGU	647	4.11	2,633	55.21	948	19.88	541	11.34	4,769	15,754	30.27	1,489	9.45
6	KROYA	731	2.96	1,874	27.05	1,991	28.74	2,332	33.66	6,928	24,736	28.01	4,323	17.48
7	MA O S	262	3.31	758	32.97	579	25.18	700	30.45	2,299	7,916	29.04	1,279	16.16
8	JERUKLEGI	533	4.39	1,716	50.09	651	19.00	526	15.35	3,426	12,149	28.20	1,177	9.69
9	KAWUNGANTEN	638	4.15	2,197	51.03	646	15.01	824	19.14	4,305	15,384	27.98	1,470	9.56
10	GANDRUNGMANGU	820	3.94	2,468	40.72	1,394	23.00	1,379	22.75	6,061	20,810	29.13	2,773	13.33
11	SIDAREJA	466	4.51	1,834	52.37	504	14.39	698	19.93	3,502	10,341	33.87	1,202	11.62
12	KARANGPUCUNG	468	3.22	2,560	55.29	627	13.54	975	21.06	4,630	14,529	31.87	1,602	11.03
13	CIMANGGU	604	2.55	3,132	44.62	1,903	27.11	1,381	19.67	7,020	23,664	29.67	3,284	13.88
14	MAJENANG	1,082	3.49	8,795	81.04	681	6.28	294	2.71	10,852	31,017	34.99	975	3.14
15	WANAREJA	623	2.67	3,879	47.22	1,718	20.91	1,995	24.28	8,215	23,332	35.21	3,713	15.91
16	DAYEULUHUR	222	1.83	1,657	47.71	761	21.91	833	23.99	3,473	12,110	28.68	1,594	13.16
17	SAMPANG	255	2.90	854	29.66	882	30.64	888	30.84	2,879	8,806	32.69	1,770	20.10
18	CIPARI	393	3.29	1,603	38.46	1,083	25.98	1,089	26.13	4,168	11,928	34.94	2,172	18.21
19	PATIMUAN	260	2.52	1,814	58.80	519	16.82	492	15.95	3,085	10,300	29.95	1,011	9.82
20	BANTARSARI	427	3.11	2,504	56.77	745	16.89	735	16.66	4,411	13,742	32.10	1,480	10.77
21	CILACAP SELATAN	460	3.45	1,192	32.52	889	24.25	1,125	30.69	3,666	13,334	27.49	2,014	15.10
22	CILACAP TENGAH	425	2.79	1,813	41.60	1,080	24.78	1,040	23.86	4,358	15,250	28.58	2,120	13.90
23	CILACAP UTARA	607	3.89	1,853	33.44	1,448	26.13	1,633	29.47	5,541	15,590	35.54	3,081	19.76
24	KAMPUNGLAUT	119	4.27	287	34.21	261	31.11	172	20.50	839	2,787	30.10	433	15.54
	Jumlah	13,097	11.44	53,323	46.57	24,358	21.27	23,721	20.72	114,499	372,116	30.77	48,079	12.92

ASPEK : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB - KR
 INDIKATOR : PUS BUKAN PESERTA KB (HAMIL, IAS, IAT, DAN TIAL) KELUARGA PRA S DAN KS I
 BULAN : DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	TAHAPAN PRA S & KS I									JUMLAH PUS	%	UMET NEED	%
		HAMIL	%	I A S	%	I A T	%	TIAL	%	JUMLAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	KEDUNGREJA	554	12.23	1,606	35.47	392	8.66	143	5.31	2,695	10,127	26.61	535	5.28
2	KESUGIHAN	221	3.36	338	5.14	1,451	22.08	1,101	35.39	3,111	9,846	31.60	2,552	25.92
3	ADIPALA	207	4.07	647	12.71	565	11.10	528	27.12	1,947	6,955	27.99	1,093	15.72
4	BINANGUN	411	10.59	1,212	31.23	96	2.47	174	9.19	1,893	7,542	25.10	270	3.58
5	NUSAWUNGU	486	10.19	1,897	39.78	435	9.12	247	8.06	3,065	8,920	34.36	682	7.65
6	KROYA	162	2.34	388	5.60	25	0.36	231	28.66	806	4,506	17.89	256	5.68
7	MA O S	106	4.61	324	14.09	207	9.00	244	27.70	881	2,866	30.74	451	15.74
8	JERUKLEGI	337	9.84	452	13.19	228	6.65	322	24.05	1,339	6,428	20.83	550	8.56
9	KAWUNGANTEN	491	11.41	1,945	45.18	526	12.22	304	9.31	3,266	8,438	38.71	830	9.84
10	GANDRUNGMANGU	492	8.12	1,481	24.43	836	13.79	827	22.74	3,636	12,484	29.13	1,663	13.32
11	SIDAREJA	204	5.83	905	25.84	226	6.45	313	18.99	1,648	4,569	36.07	539	11.80
12	KARANGPUCUNG	209	4.51	1,082	23.37	254	5.49	579	27.26	2,124	6,646	31.96	833	12.53
13	CIMANGGU	311	4.43	972	13.85	827	11.78	632	23.05	2,742	10,869	25.23	1,459	13.42
14	MAJENANG	571	5.26	4,568	42.09	356	3.28	153	2.71	5,648	12,809	44.09	509	3.97
15	WANAREJA	211	2.57	1,404	17.09	596	7.26	607	21.54	2,818	5,635	50.01	1,203	21.35
16	DAYEULUHUR	36	1.04	657	18.92	187	5.38	198	18.37	1,078	3,861	27.92	385	9.97
17	SAMPANG	95	3.30	153	5.31	200	6.95	237	34.60	685	2,742	24.98	437	15.94
18	CIPARI	167	4.01	906	21.74	418	10.03	426	22.22	1,917	5,722	33.50	844	14.75
19	PATIMUAN	71	2.30	1,066	34.55	272	8.82	203	12.59	1,612	4,965	32.47	475	9.57
20	BANTARSARI	264	5.99	1,552	35.18	461	10.45	455	16.65	2,732	8,514	32.09	916	10.76
21	CILACAP SELATAN	280	7.64	691	18.85	599	16.34	618	28.24	2,188	5,915	36.99	1,217	20.57
22	CILACAP TENGAH	101	2.32	229	5.25	264	6.06	362	37.87	956	3,727	25.65	626	16.80
23	CILACAP UTARA	170	3.07	439	7.92	338	6.10	344	26.65	1,291	3,235	39.91	682	21.08
24	KAMPUNGLAUT	60	68.00	138	16.45	122	14.54	86	21.18	406	1,352	30.03	208	15.38
Jumlah		6,217	5.43	25,052	21.88	9,881	8.63	9,334	18.49	50,484	158,673	31.82	19,215	12.11

**PARAMETER KEPENDUDUKAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	CBR	TFR	LUAS WILAYAH	KEPADATAN	PENYEBARAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	KEDUNGREJA	16.74	2.44	71.43	1,164	4.51
2	KESUGIHAN	19.80	2.89	82.31	1,487	6.64
3	ADIPALA	18.32	2.68	61.19	1,410	4.68
4	BINANGUN	13.77	2.01	51.42	1,215	3.39
5	NUSAWUNGU	15.70	2.29	61.26	1,263	4.20
6	KROYA	16.24	2.37	58.83	1,838	5.87
7	M A O S	12.94	1.89	28.05	1,621	2.47
8	JERUKLEGI	17.22	2.51	96.80	735	3.86
9	KAWUNGANTEN	16.29	2.38	117.43	694	4.42
10	GANDRUNGMANGU	14.96	2.18	143.19	731	5.68
11	SIDAREJA	15.45	2.26	54.95	1,081	3.22
12	KARANGPUCUNG	13.82	2.02	115.00	679	4.24
13	CIMANGGU	15.19	2.22	167.44	597	5.43
14	MAJENANG	18.93	2.76	138.56	949	7.14
15	WANAREJA	15.28	2.23	189.73	527	5.43
16	DAYEUHLUHUR	12.38	1.81	185.06	259	2.60
17	SAMPANG	14.42	2.11	27.30	1,468	2.13
18	CIPARI	16.36	2.39	121.47	529	3.49
19	PATIMUAN	15.90	2.32	75.30	628	2.57
20	BANTARSARI	16.36	2.39	95.54	728	3.77
21	CILACAP SELATAN	15.22	2.22	9.11	9,024	4.46
22	CILACAP TENGAH	15.93	2.33	22.15	3,957	4.76
23	CILACAP UTARA	20.39	2.98	18.84	4,104	4.20
24	KAMPUNGLAUT	14.63	2.14	146.14	102	0.81
KABUPATEN		15.53	2.37	2,138.50	862	100.00

**DATA JUMLAH PENDUDUK DAN KELAHIRAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			SEX RATIO	JUMLAH KELAHIRAN
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7
1	KEDUNGREJA	42,436	40,716	83,152	1.042	1,304
2	KESUGIHAN	62,325	60,042	122,367	1.038	2,021
3	ADIPALA	44,079	42,175	86,254	1.045	1,526
4	BINANGUN	31,646	30,838	62,484	1.026	990
5	NUSAWUNGU	39,079	38,298	77,377	1.020	1,178
6	KROYA	54,742	53,396	108,138	1.025	1,661
7	M A O S	22,796	22,667	45,463	1.006	549
8	JERUKLEGI	36,139	35,005	71,144	1.032	1,083
9	KAWUNGANTEN	41,499	39,988	81,487	1.038	1,334
10	GANDRUNGMANGU	53,329	51,370	104,699	1.038	1,583
11	SIDAREJA	30,059	29,359	59,418	1.024	873
12	KARANGPUCUNG	39,727	38,342	78,069	1.036	1,055
13	CIMANGGU	50,856	49,184	100,040	1.034	1,473
14	MAJENANG	66,356	65,149	131,505	1.019	2,412
15	WANAREJA	50,577	49,502	100,079	1.022	1,458
16	DAYEUHLUHUR	23,782	24,166	47,948	0.984	544
17	SAMPANG	20,176	19,887	40,063	1.015	582
18	CIPARI	32,558	31,678	64,236	1.028	1,020
19	PATIMUAN	23,923	23,358	47,281	1.024	668
20	BANTARSARI	35,495	34,050	69,545	1.042	1,047
21	CILACAP SELATAN	41,401	40,811	82,212	1.014	1,228
22	CILACAP TENGAH	44,308	43,340	87,648	1.022	1,302
23	CILACAP UTARA	38,947	38,379	77,326	1.015	1,468
24	KAMPUNGLAUT	7,779	7,199	14,978	1.081	262
KABUPATEN		934,014	908,899	1,842,913	1.028	28,621

LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN : CILACAP
TAHUN : 2018

SPM LK I

No	KECAMATAN	Jumlah Perkawinan 2018	Usia istri < 20 Tahun	Jumlah PUS	Jumlah PUS yang istrinya berusia < 20 Tahun	Jumlah PA	Jumlah PUS yang tidak ber-KB (TIAL + IAT)	Jumlah PUS Anggota BKB	Jumlah PUS Anggota BKB yang ber-KB	Jumlah PUS Anggota UPPKS	Jumlah PUS anggota UPPKS yang ber-KB	Jumlah Desa/Kel yang ada	Jumlah PLKB/PKB	Jumlah PPKBD	Jumlah PPM PA di Kecamatan	Jumlah ALKON yang disediakan APBD II	Jumlah Rekap. Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	KEDUNGREJA	927	115	14,176	79	9,648	1,565	725	684	184	156	11	2	11	8,714	0	11
2	KESUGIHAN	1,330	416	22,287	201	15,714	3,654	816	521	621	517	16	6	16	19,150	0	16
3	ADIPALA	999	60	18,203	134	13,113	2,762	1,082	874	169	116	16	6	16	11,975	0	16
4	BINANGUN	754	206	13,971	24	10,090	1,136	1,535	896	1,488	1,016	17	4	17	9,268	0	17
5	NUSAWUNGU	872	79	15,754	60	10,985	1,489	847	757	1,473	1,012	17	5	17	10,999	0	17
6	KROYA	1,140	88	24,736	50	17,808	4,323	594	416	513	183	17	4	17	16,793	0	17
7	MA O S	468	41	7,916	35	5,617	1,279	1,015	819	109	89	10	4	10	4,749	0	10
8	JERUKLEGI	818	126	12,149	90	8,723	1,177	561	404	298	259	13	5	13	6,662	0	13
9	KAWUNGANTEN	1,037	142	15,384	187	11,079	1,470	648	528	102	98	12	2	12	8,386	0	12
10	GANDRUNGMANGU	1,201	148	20,810	131	14,749	2,773	526	384	273	233	14	4	14	8,896	0	14
11	SIDAREJA	701	85	10,341	98	6,839	1,202	707	631	487	387	10	2	10	7,865	0	10
12	KARANGPUCUNG	706	131	14,529	146	9,899	1,602	458	355	1,127	301	14	2	14	7,761	0	14
13	CIMANGGU	1,104	221	23,664	170	16,644	3,284	684	502	119	97	15	3	15	9,579	0	15
14	MAJENANG	1,428	266	31,017	311	20,165	975	399	259	35	28	17	3	17	15,427	0	17
15	WANAREJA	1,127	270	23,332	246	15,117	3,713	464	443	450	369	16	6	16	12,638	0	16
16	DAYEHLUHUR	506	159	12,110	140	8,637	1,594	839	821	291	253	14	4	14	3,830	0	14
17	SAMPANG	421	30	8,806	13	5,927	1,770	1,157	972	276	229	10	4	10	5,394	0	10
18	CIPARI	709	133	11,928	129	7,760	2,172	904	703	263	207	11	3	11	5,959	0	11
19	PATIMUAN	497	99	10,300	105	7,215	1,011	250	241	42	38	7	1	7	4,434	0	7
20	BANTARSARI	885	127	13,742	182	9,331	1,480	400	325	202	146	8	3	8	6,124	0	8
21	CILACAP SELATAN	831	92	13,334	93	9,668	2,014	458	302	41	35	5	7	10	10,424	0	5
22	CILACAP TENGAH	901	83	15,250	65	10,892	2,120	547	430	94	69	5	6	5	12,613	0	5
23	CILACAP UTARA	783	65	15,590	93	10,049	3,081	684	521	164	111	5	5	5	11,447	0	5
24	KAMPUNGLAUT	154	38	2,787	26	1,948	433	158	158	29	29	4	2	7	1,478	0	4
	KABUPATEN	20,299	3,220	372,116	2,808	257,617	48,079	16,458	12,946	8,850	5,978	284	93	292	220,565	-	284

LEMBAR KERJA II

HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : CILACAP

TAHUN : 2018

SPM LK II

No	KECAMATAN	Persentase Perkawinan 2018 yang Istrinya berusia < 20 tahun (10 %) (4 / 3)	Persentase PUS yang Istrinya berusia < 20 tahun (3,5%) (6 / 5)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif (PA) (65%) (7 / 5)	Persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) (9%) (8 / 5)	Persentase PUS anggota BKB yang ikut KB (70%) (10 / 9)	Persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB (87%) (12 / 11)	Rasio PKB/PLKB di Desa/Kelurahan (2) (14 / 13)	Rasio PPKBD di Desa/Kelurahan (1) (15 / 13)	Cakupan Penyediaan ALKON untuk memenuhi Permintaan Masyarakat (30%) (17 / 16)	Cakupan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa /Kelurahan (100%) (18 / 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEDUNGREJA	12.41	0.6	68.06	11.04	94.34	84.78	5.5	1.0	0.0	100.00
2	KESUGIHAN	31.28	0.9	70.51	16.40	63.85	83.25	2.7	1.0	0.0	100.00
3	ADIPALA	6.01	0.7	72.04	15.17	80.78	68.64	2.7	1.0	0.0	100.00
4	BINANGUN	27.32	0.2	72.22	8.13	58.37	68.28	4.3	1.0	0.0	100.00
5	NUSAWUNGU	9.06	0.4	69.73	9.45	89.37	68.70	3.4	1.0	0.0	100.00
6	KROYA	7.72	0.2	71.99	17.48	70.03	35.67	4.3	1.0	0.0	100.00
7	M A O S	8.76	0.4	70.96	16.16	80.69	81.65	2.5	1.0	0.0	100.00
8	JERUKLEGI	15.40	0.7	71.80	9.69	72.01	86.91	2.6	1.0	0.0	100.00
9	KAWUNGANTEN	13.69	1.2	72.02	9.56	81.48	96.08	6.0	1.0	0.0	100.00
10	GANDRUNGMANGU	12.32	0.6	70.87	13.33	73.00	85.35	3.5	1.0	0.0	100.00
11	SIDAREJA	12.13	0.9	66.13	11.62	89.25	79.47	5.0	1.0	0.0	100.00
12	KARANGPUCUNG	18.56	1.0	68.13	11.03	77.51	26.71	7.0	1.0	0.0	100.00
13	CIMANGGU	20.02	0.7	70.33	13.88	73.39	81.51	5.0	1.0	0.0	100.00
14	MAJENANG	18.63	1.0	65.01	3.14	64.91	80.00	5.7	1.0	0.0	100.00
15	WANAREJA	23.96	1.1	64.79	15.91	95.47	82.00	2.7	1.0	0.0	100.00
16	DAYEUHLUHUR	31.42	1.2	71.32	13.16	97.85	86.94	3.5	1.0	0.0	100.00
17	SAMPANG	7.13	0.1	67.31	20.10	84.01	82.97	2.5	1.0	0.0	100.00
18	CIPARI	18.76	1.1	65.06	18.21	77.77	78.71	3.7	1.0	0.0	100.00
19	PATIMUAN	19.92	1.0	70.05	9.82	96.40	90.48	7.0	1.0	0.0	100.00
20	BANTARSARI	14.35	1.3	67.90	10.77	81.25	72.28	2.7	1.0	0.0	100.00
21	CILACAP SELATAN	11.07	0.7	72.51	15.10	65.94	85.37	0.7	0.5	0.0	100.00
22	CILACAP TENGAH	9.21	0.4	71.42	13.90	78.61	73.40	0.8	1.0	0.0	100.00
23	CILACAP UTARA	8.30	0.6	64.46	19.76	76.17	67.68	1.0	1.0	0.0	100.00
24	KAMPUNGLAUT	24.68	0.9	69.90	15.54	100.00	100.00	2.0	0.6	0.0	100.00
	KABUPATEN	15.86	0.8	69.23	12.92	78.66	67.55	3.1	1.0	0.0	100.00

**HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018**

NO	INDIKATOR	STANDART SPM (%)	HASIL EVALUASI	STANDART NILAI ANALISIS	HASIL ANALISIS
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perkawinan yang Istrinya berusia < 20 tahun	10	15.86	100	63.04
2	Persentase PUS yang Istrinya berusia < 20 tahun	3.5	0.8	100	463.82
3	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	65	69.23	100	106.51
4	Persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need)	9	12.92	100	69.66
5	Persentase PUS Keluarga anggota BKB yang ikut KB	70	78.66	100	112.37
6	Persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB	87	67.55	100	77.64
7	Rasio PKB/PLKB di Desa/Kel	2	3.1	100	65.49
8	Rasio PPKBD di Desa/Kel	1	1	100	100
9	Cakupan Penyediaan ALKON untuk memenuhi Permintaan Masyarakat	30	0	100	0.00
10	Cakupan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa /Kelurahan	100	100	100	100.00
TOTAL				1,000	1158.53

**LAPORAN HASIL ADVOKASI DAN ASSISTENSI PROGRAM KKBPK
PADA APBDESA TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KEGIATAN YANG DIDANAI APBDes TAHUN 2018	TOTAL ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KEDUNGREJA	11	20	Rp 32,157,000
2	KESUGIHAN	16	13	Rp 63,414,000
3	ADIPALA	16	36	Rp 102,481,487
4	BINANGUN	17	17	Rp 125,119,000
5	NUSAWUNGU	17	32	Rp 65,905,000
6	KROYA	17	33	Rp 154,746,300
7	M A O S	10	19	Rp 230,247,500
8	JERUKLEGI	13	15	Rp 123,380,000
9	KAWUNGANTEN	12	25	Rp 160,855,000
10	GANDRUNGMANGU	14	19	Rp 140,851,000
11	SIDAREJA	10	18	Rp 82,344,000
12	KARANGPUCUNG	14	12	Rp 155,894,800
13	CIMANGGU	15	15	Rp 75,000,000
14	MAJENANG	17	3	Rp 37,472,500
15	WANAREJA	16	16	Rp 147,500,000
16	DAYEUHLUHUR	14	14	Rp 61,781,000
17	SAMPANG	10	45	Rp 281,759,250
18	CIPARI	11	7	Rp 101,731,400
19	PATIMUAN	7	11	Rp 79,960,000
20	BANTARSARI	8	12	Rp 134,478,500
21	CILACAP SELATAN	5	0	KELURAHAN
22	CILACAP TENGAH	5	0	KELURAHAN
23	CILACAP UTARA	5	0	KELURAHAN
24	KAMPUNGLAUT	4	4	Rp 77,000,000
CILACAP		284	386	Rp 2,434,077,737